STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

(Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR dan UMKM Kota Madiun)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HIDAYATI SUHARTINI

NIM. 105030103111015

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR dan UMKM Kota Madiun)

Disusun oleh : Hidayati Suhartini

NIM : 105030103111015

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 08 Desember 2014

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Irwan Noor, M.A	**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**
NIP.19611024 198601 1 002	**NIP. 196990524 200212 2 002**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Desember 2014
Jam	: 08:00 WIB
Skripsi atas nama	: Hidayati Suhartini
Judul	: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR dan UMKM Kota Madiun)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Irwan Noor, M.A
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 196990524 200212 2 002

Anggota

Dr. Alfi Hariswanto, S. AP., M. AP. MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota

Drs. Abdul Wachid, M. AP
NIP. 19561209 198703 1 008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 November 2014

Hidayati Suhartini
NIM. 105030103111015

ABSTRAK

Hidayati Suhartini, 2014. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun) Dr. Irwan Noor, M.A, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, 205 hal+xxi.

Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin meningkatnya persaingan dalam perdagangan bebas yang bisa mengancam sektor-sektor ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Hal ini dikarenakan industri-industri di Kota Madiun pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (*high cost production*) sehingga kurang mampu bersaing di dalam harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Oleh karena itu, diperlukannya strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun.

Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun dan apa saja yang menjadi indikator utama penentunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dengan melibatkan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri beserta pelaku UMKM di Kota Madiun. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun yaitu dengan cara peningkatan permodalan, pengembangan pasar UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas teknologi. Indikator utama penentu strategi tersebut yaitu efektifitas, efisiensi, dan inovatif.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu sebaiknya menjalin kemitraan dengan perusahaan, perguruan tinggi, maupun swasta dalam pembinaan UMKM agar hasilnya menjadi lebih baik bagi kemajuan UMKM, meningkatkan penggunan teknologi agar lebih efektif, efisien, ekonomis dalam kelangsungan usaha dan untuk pelaku usaha UMKM harus dapat berinovasi dalam pengemasan hasil produksi.

Kata Kunci: Strategi, pemberdayaan UMKM, daya saing, sektor perdagangan dan industri

SUMMARY

Hidayati Suhartini, 2014. Local Goverment strategies for UMKM Empowerment to Increase The Competing Ability of Trade and Industrial Sectors (Study at PERINDAGKOPPAR of Madiun City). Dr.Iwan Noor,M.A, Dr.Lely Indah Mindari, M.Si.205 pages + xxi

The background of research is the increase of competition rate during free trade which is assumed that it will threaten local economic sectors, including trade and industrial sectors in Madiun City. Most industries in Madiun City are high-cost production such that they cannot compete in price basis against import products with more comparative values over local product. Therefore, local goverment strategies for the empowerment of micro, small, medium enterprises (MSME) are truly important to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City.

Research discusses about problems of research, which are: how local goverment strategies for MSME (micro, small and medium enterprises) empowerment can increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City and what are the determinant indicators. Research method is qualitative with descriptive approach. Data collection techniques include interview, observation and documentation. Data are obtained from *Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri* and also from the actors of MSME (micro, small and medium enterprises) in Madiun City. Data analysis method is Miles and Huberman's Interactive Model.

Result of research reveals that local government strategies for MSME (micro, small and medium enterprises) empowerment to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City are by increasing the capitalization, developing the markets for MSME (micro, small and medium enterprises), improving the quality of human resource, and improving the quality of technology. Main determinant indicators for these strategies are effectiveness,efficiency and innovativeness.

Considering the result above, some recommendations are given. The government shall develop a patnership with company, higher education, and private for the fostering of MSME (micro, small and medium enterprises) in order to produce better progress for MSME. Also, MSME must use their technology in more effective, efficient and economic ways for the sustainability of their business. The actors of MSME (micro, small and medium enterprises) must improve their innovative competence in packing their products.

Keywords: Strategy, MSME (micro, small and medium enterprises) Empowerment, Competing Ability, Trade and Industrial Sector.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun) dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M. Si Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, M.A selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Alfi Hariswanto, S. AP., M. AP. MMG selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Bapak Drs. Abdul Wachid, M. AP selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan terhadap skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun beserta staf yang telah membantu selama penelitian.
9. Bapak/Ibu pelaku usaha UMKM di Kota Madiun yang telah membantu selama penelitian.
10. Kedua orang tua, Ayahanda Suharto dan Ibunda Zuriah Apriliantin yang selalu memberikan doa setiap saat dan dukungan yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Adik tersayang Ario Dwi Martanto yang selalu memberikan dukungan dan doa.
12. Suami Ariefianto yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa selama mengerjakan skripsi ini.

13. Ananda Nayaka Anindya Arief yang selalu memberikan semangat, menghibur serta doa. I love my son, i love my little angel, you are my everything.
14. Naomi, Luffi, Henny, Deo, Tegar, Chandra yang selalu memberikan dukungan, menghibur serta doa. Sukses selalu buat kalian.
15. Mas Khilmy, Mas Kurnia, Mas Mamad, Mba Nike dan sahabat-sahabat yang lain telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat pebulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangNya untu kita semua, dan penulis mohon maaf atas keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini.

Malang, 29 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iii**
PERSYARATAN ORISINALITAS ..... **iv**
RINGKASAN ..... **v**
SUMMARY ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 19
C. Tujuan Penelitian 19
D. Kontribusi Penelitian 20
E. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan 24
B. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pemerintah Daerah/Lokal 27
   1. Pengertian Desentralisasi 27
   2. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah/Lokal 32
C. Pengembangan Ekonomi Lokal 43
D. Konsep Strategi 54
   1. Pengertian Strategi 54
   2. Level Strategi 55
   3. Peranan Strategi 57
   4. Manajemen Strategi 58
E. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah 60
   1. Definisi Strategi Daya Saing Daerah 60
   2. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah 62
   3. Daya Saing dengan Strategi Berbasis Potensi Daerah 64
   4. Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah 64
F. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 72
   1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat 72
   2. Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat 74

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan 76
F. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) 77
1. Pengertian UMKM 77
2. Asas dan Tujuan UMKM 79
3. Pemberdayaan UMKM 80
4. Kriteria UMKM 82
5. Strategi Pemberdayaan UMKM 82
6. Kelebihan dan Kelemahan 87

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 89
B. Fokus Penelitian 90
C. Lokasi dan Situs Penelitian 91
D. Jenis dan Sumber Data 92
E. Tehnik Pengumpulan Data 93
F. Instrumen Penelitian 95
G. Analisis Data 95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Madiun 100
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 100
2. Pemerintahan Daerah 103
3. Kondisi Ekonomi 112
a. Potensi Unggulan Daerah 112
b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 113
4. Perdagangan 120
5. Industri 123
B. Gambaran Umum UMKM di Kota Madiun 124
C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 128
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri 128
a. Peningkatan Permodalan 129
b. Pengembangan Pasar UMKM 133
c. Peningkatan Kualitas SDM 136
d. Peningkatan Kualitas Teknologi 143
2. Indikator Utama Penentu Daya Saing dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri 145
a. Efektif 146
b. Efisien 154
c. Inovatif 164

D. Analisis Data 172
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri 172
a. Peningkatan Permodalan 174
b. Pengembangan Pasar UMKM 176
c. Peningkatan Kualitas SDM 179
d. Peningkatan Kualitas Teknologi 182
2. Indikator Utama Penentu Daya Saing dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri 184
a. Efektif 185
b. Efisien 190
c. Inovatif 195

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 201
B. Saran 204

DAFTAR PUSTAKA 174

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Misi dan Penjabaran TujuanDinas Koperasi dan UKM Kota Madiun 2010-2014	16
2.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun	92
3.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun Tahun 2012	93
4.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)	102
5.	Perkembangan PDRB Kota Madiun Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	102
6.	Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan (Juta Rupiah)	103
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2011-2013	104
8.	Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%)	105
9.	Perekonomian Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (%)	106
10.	Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2011-2013	107
11.	Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran pada Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kota Madiun Tahun 2011-2013	109
12.	Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%)	130
13.	Perekonomian Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (%)	130
14.	Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2011-2013 (%)	131

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Analisis Data Miles and Huberman	86

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas	xv
2.	Surat Pengantar dari Bakesbang Kota Madiun	xvi
3.	Daftar Wawancara	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara berkembang termasuk Indonesia, prioritas dalam menjalankan negaranya adalah melalui pembangunan nasional yang memiliki berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Indonesia melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Siagian dalam Suryono (2010:2) pembangunan diartikan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perbuatan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Namun masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah perhatian penting dalam administrasi pembangunan.

Menurut Kristiadi (1997:2) administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yang memiliki

pengertian sebagai administrasi negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Selain itu administrasi pembangunan juga merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan (Kartasasmita). Oleh karena itu administrasi pembangunan berorientasi pada upaya untuk mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik, berorientasi masa depan secara efektif dan efisien.

Dimensi pembangunan memiliki cakupan yang luas yakni meliputi bidang wilayah, sumber daya alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam (Suryono, 2010:4). Di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) pembangunan biasanya difokuskan ke bidang ekonomi, sehingga terjadinya perubahan sosial tidak akan punya arti apabila tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi (Suryono, 2010:2). Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengupayakan distribusi pendapatan masyarakat secara lebih adil. Dalam hal pembangunan ekonomi tentu ada berbagai macam segi, aspek atau peran pelaku ekonomi. Sementara itu dilihat dari tujuannya, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Selain meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat,

tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan dan nilai-nilai budaya. Pembangunan ekonomi ini perlu dipandang sebagai suatu proses supaya saling berkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator pembangunan ekonomi di Indonesia diukur dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto). Akan tetapi tujuan utama dari pembangunan ekonomi bukanlah untuk pertumbuhan PDB, melainkan bagaimana upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor yang mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan telah menjadi pilar besar perekonomian di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perdagangan dan industri. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan dan industri ditunjukkan dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Dometik Bruto (PDB) atas harga berlaku maupun konstan pada sektor industri pengolahan yaitu 589,1 triliun rupiah dan 183,5 triliun rupiah dalam triwulan ke II tahun 2014. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 362,4 triliun rupiah dan 130,7 triliun rupiah dalam triwulan ke II tahun 2014. Sektor industri pengolahan merupakan sektor penyumbang

PDB terbesar pertama yaitu sebesar 23,75 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor terbesar ketiga setelah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 14,61% (BPS,2014).

Pembangunan ekonomi nasional melalui sektor perdagangan dan industri tentunya tidak terlepas dari kontribusi pembangunan ekonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 13 ayat 2 dan 14 ayat 2 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Adanya undang-undang tersebut maka pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pembangunan termasuk pembangunan otonomi daerah melalui sektor perdagangan dan industri. Blakely dalam Supriyadi (2007:107) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang berperan aktif mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya, menciptakan lapangan kerja, memberikan stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya merupakan suatu bentuk pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengembangan ekonomi

lokal diharapkan pemerintah daerah mampu menghadapi berbagai bentuk permasalahan ekonomi, salah satunya dalam menghadapi persaingan disektor-sektor ekonominya antara lain sektor perdagangan dan industri.

Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri, pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan strategi melalui pemberdayaan UMKM. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja, kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah serta UMKM juga merupakan sumber pendapatan bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat lokal suatu daerah. UMKM mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM diartikan secara terpisah. Pengertian UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha

> yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengingat kondisi perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, sehingga menciptakan suatu persaingan yang ketat. Hendaknya pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Hal ini menyadarkan pentingnya keberadaan UMKM seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana tujuan UMKM disini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan tujuan di atas maka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini, UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing khususnya di bidang industri dan perdagangan. Ketentuan ini juga telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat

nasional maupun tingkat daerah. Program jangka menengah seperti ini yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014 yang mencerminkan strategi pemberdayaan UMKM dalam lingkup makro, meso maupun mikro.

Pada tataran makro, RPJMN 2010-2014 memuat kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan daya saing (*competitiveness*) Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, tantangan untuk lima tahun kedepan antara lain persaingan usaha yang makin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumber daya yang diperlukan oleh Koperasi dan UMKM.

Pada tataran meso, dokumen rencana jangka menengah memuat upaya peningkatan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif guna meningkatkan permodalan dan perluasan usaha mereka. Fokusnya tentu terkait dengan masalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perluasan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses terhadap modal dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

Kemudian pada tataran mikro, dokumen RPJMN memiliki sasaran yang jelas tentang upaya untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha. Rancangan jangka menengah menekankan bahwa pelaku usaha Koperasi dan UMKM tidak lagi bisa menjalankan bisnis seperti pola yang selama ini diterapkan (*business as usual*). Mereka harus benar-benar dibantu untuk menumbuhkan

kewirausahaan, budaya kerja, dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi usaha yang memiliki daya saing yang tinggi.

UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergrak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2013), poupulasi UMKM jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9% dari ksluruhan pelaku bisnis di tanah air. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 99,6%. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 56,7%.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertam, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalan setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data BPS 2013, jumlah UMKM tercatat 41,36 unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang sangat pesat dan menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat, menuntut produsen untuk lebih peka, kritis dan kreatif terhadap perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, dan ekonomi. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu

perusahaan agar dapat mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang serta jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya (Tjiptono, 2008:86).

Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan-kebijakan strategis baru dalam menjual produk dan jasa mereka dalam kaitannya menghadapi persaingan yang ketat dengan *competitor* yang dapat memberikan *value* yang lebih besar kepada *costumer*. Pada dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam mengahadapi setiap produk yang diluncurkan di pasar.

Masyarakat kini mulai berpikir selektif dan *smart* dalam memilih suatu produk, sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan dan manfaat yang mereka cari dari sebuah produk. Bahkan, terkadang mereka tidak ragu untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang

berkualitas. Ketatnya persaingan akan memposisikan pemasaran untuk selalu mengembangkan dan merebut *market share*.

Kondisi persaingan yang cukup ketat dan komplek ini, khususnya disektor perdagangan dan industri menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta perubahan yang ada agar mampu bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan disini terkait dengan bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan konsumen, persaingan dengan kompetitor yang lain, serta perubahan yang terjadi di pasar. Selain itu, dengan masuknya beberapa produk yang inovatif ke pemasaran di satu sisi dan kondisi pasar yang semakin jenuh untuk beberapa produk tertentu disisi lain, menyebabkan tugas untuk mengelola loyalitas pelanggan menjadi tantangan manajerial yang tidak ringan, kepergian pelanggan merupakan salah satu kadar ukuran paling nyata didalam bisnis. Kepergian palanggan merupakan pertanda yang paling mungkin, bahwa pelanggan melihat suatu aliran nilai yang merosot dari suatu perusahaan. Suatu tingkat kepergian yang meningkat, merupakan suatu pertanda akan adanya pengurangan *cash flow* dari pelanggan kepada perusahaan (meskipun perusahaan mampu mengganti pelanggan yang hilang), karena untuk mendapatkan pelanggan baru membutuhkan biaya dan pelanggan lama cenderung memberikan *cash flow* serta keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pelanggan yang baru.

Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Adanya persaingan, maka perusahaan-perusahaan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi keninginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnisnya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sudah seharusnya perusahaan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahannya dan memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan khususnya dalam menghadapi persaingan di sektor industri dan perdagangan.

Pada hal ini, dalam melakukan berbagai strategi di bidang persaingan usaha, maka perusahaan berharap untuk dapat menciptakan produk yang benar-benar baru atau lain dari yang sebelumnya atau membuat produk yang merupakan perbaikan yang telah ada sebelumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya sebatas melihat pada nilai atau fungsi dari suatu produk yang dibutuhkan, tetapi konsumen juga memperhatikan apakah produk yang dipilih memliki nilai tambah atau kelebihan dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Keinginan inilah yang harus dimengerti oleh produsen sebagai landasan untuk melakukan proses inovasi. Perkembangan inovasi yang berhasil

akan menjadi strategi yang tepat untuk mempertahankan kedudukan produk di pasar, karena sebagian besar dari produk pesaing tampil statis dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal di atas mengingat semakin kompleknya tantangan dalam pemberdayaan UMKM, peran pemerintah diharapkan benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja yang saat ini diperlukan. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah di atas, pemerintah harus berani mengubah paradigma pemberdayaan yang selama ini kita ketahui, yang mana mamandang UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya lemah, remeh, terbelakang dan pantas dikasihani. Program-program pemberdayaan hendaknya jangan seperti program *charty* (amal), yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, pogram pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha UMKM.

Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dalam situasi krisis moneter. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM

menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang melakukan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor ekonominya. Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun ini merupakan sebuah gerakan yang telah disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui optimalisasi peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP, dengan salah satu misinya yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk: (1) Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM, Koperasi, dan perdagangan regional; (2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan; dan (3) Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi. (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun, 2013).

Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan pemerintah daerah di Kota Madiun ini menghasilkan keberagaman jenis usaha UMKM yang kualitas dan mutu produknya pun tidak kalah dengan produk-produk UMKM daerah lain, yakni seperti brem, sambel pecel, madu mongso, batik, manik-manik, clay panorama, dan masih banyak lainnya produk-produk UMKM unggulan yang dihasilkan para pelaku UMKM yang ada di

Kota Madiun. Produk-produk unggulan yang dihasilkan melalui pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu bersaing dengan produk usaha lain. Walaupun pada potensi ekonomi Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiannya mangandalkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi dan konstribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun, 2013).

Kota Madiun yang merupakan daerah pengembangan Jawa Timur di bagian wilayah barat, mengakibatkan banyak investor dari luar daerah maupun luar negeri menanamkan investasinya dalam bentuk usaha-usaha besar yang dimilikinya. Disisi lain hal tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi daerah, namun dengan hadirnya usaha-usaha besar tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat dan dikhawatirkan UMKM yang berasal dari masyarakat Kota Madiun itu sendiri tidak dapat bersaing dengan para investor yang menanamkan usahanya di Kota Madiun. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Kota Madiun yaitu Ibu TATIEK WURYANDARI, SE yang menyatakan:

> "Kota Madiun merupakan kota transit bagi turis domestik maupun mancanegara ini, cepat atau lambat pasti akan merasakan dampak positif maupun negatif dari kebijakan nasional yang ikut dalam globalisasi perdagangan. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah dampak negatif dari perdagangan bebas tersebut yang bisa mengancam sektor-sektor ekonomi daerah khususnya disektor perdagangan dan industri. Industri-industri di Kota Madiun yang bakal terancam dengan kebijakan nasional tersebut adalah seluruh sektor-sektor industri baik itu industri besar sampai dengan kecil. Hal ini dikarenakan industri-industri dalam negeri tidak terkecuali Kota Madiun pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (*high cost production*) sehingga kurang mampu bersaing secara harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Dampak yang lebih mengerikan dari ketidakmampuan bersaing adalah turunnya tingkat produksi dan bangkrutnya industri-industri tersebut termasuk UMKM yang berasal dari Kota Madiun itu sendiri, meningkatnya penduduk yang kurang mampu dan menyebabkan pengangguran semakin meningkat akibat banyaknya PHK (Putus Hubungan Kerja)". (Data wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Adanya usaha-usaha besar yang menjual produk-produk impor tersebut membuat pelaku UMKM merugi dari segi pendapatan karena harga jual produk impor lebih murah dibandingkan produk lokal yang pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi. Terkait dengan masalah yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Madiun, Ibu SAPTO SUSILOWATI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun menyatakan sebagai berikut:

> "Permasalahan yang kerap dihadapi para pelaku UMKM adalah salah pengelolaan dari aspek managerial dan aspek produksi yang dilakukan oleh UMKM, kemudian ketersediaan bahan baku bagi UMKM tertentu yang kebetulan bahan bakunya sulit atau tidak terdapat di Kota Madiun dan yang terakhir adalah dari segi permodalan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Sehingga hal ini menyebabkan UMKM yang ada di Kota Madiun kurang mampu bersaing dengan usaha besar lainnya". (Data wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Madiun menyusun dan melaksanakan strategi melalui pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu NINA HARTATI, SH selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, yang menyatakan:

> "dalam menghadapi persaingan dunia bisnis maupun globalisasi perdagangan yang terjadi di Kota Madiun, pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan strategi melalui pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri, hal ini bisa menjadi langkah yang logis daripada berambisi menyaingi suatu produk industri yang menjadi unggulan dari potensi daerah lain. Sebab dengan cara memberdayakan UMKM, suatu daerah dapat dimungkinkan masih mampu bersaing dengan daerah lain di "kandang" sendiri atau daerah tersebut, terlebih lagi jika mampu menguasai pasar lokal daerah lain. Selain itu suatu daerah juga dapat menjaga roda perekonomiannya terutama industri agar tetap berjalan *continue.* Untuk menghadapi permasalahan globalisasi perdagangan, dengan menggunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah khususnya di bidang industri, diharapkan mampu memberikan kontribusi dan bisa menjadi sektor yang diandalkan oleh daerah. (Data wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan UMKM di Kota Madiun memiliki tujuan yang tertuang dalam rencana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun, yaitu sebagai berikut:

Tabel I
Misi dan Penjabaran Tujuan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Madiun 2010-2014

No	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha	Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan, diklat, sosialisasi serta dalam rangka membina dan menumbuhkembangkan usaha dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pariwisata.
2.	Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Pemberian sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3.	Mewujudkan peningkatan perluasan pasar dan jaringan.	Pelaksanaan pengembangan pasar dan perluasan jaringan usaha dilaksanakan melalui koordinasi, promosi, pameran serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk unggulan Kota Madiun.
4.	Mewujudkan pengembangan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.	Pengembangan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan diwujudkan dengan penyusunan peraturan, kebijakan, database, dan evaluasi serta pelaporan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun 2010-2014

Berdasarkan tujuan dalam tabel I membuktikan bahwa pemerintah Kota Madiun tetap berusaha untuk mengembangkan perekonomian lokal dengan berbasis pemberdayaan UMKM dalam menghadapi persaingan disektor perdagangan dan industri di wilayah Kota Madiun, dimana dalam tujuan dari misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun adanya poin mengenai pelaksanaan pengembangan pasar dan perluasan jaringan usaha yang dilaksanakan melalui koordinasi, promosi, pameran serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk unggulan Kota Madiun. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing

sektor perdagangan dan industri, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun memberikan fasilitasi kepada para pelaku UMKM dalam bentuk peningkatan modal, pengembangan pasar UMKM, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas penggunaan teknologi dalam mengembangkan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

Dalam rangka mempertahankan ekonomi nasional, khususnya daerah dan berdasarkan fenomena kondisi Kota Madiun yang telah diuraikan di atas, pemerintah Kota Madiun dituntut mampu memberikan konstribusi dalam mempertahankan ekonomi nasional. Strategi-strategi yang tepat dari pemerintah Kota Madiun saat ini penting untuk menyelamatkan ekonomi lokal dari serangan barang-barang impor di masa mendatang. Adanya strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi industri dan perdagangan melalui pemberdayaan UMKM, maka diharapkan Kota Madiun mampu untuk terus membangun perekonomiannya dalam rangka meningkatkan daya saing disektor ekonominya yaitu sektor perdagangan dan industri. Strategi yang matang akan membuat proses pemberdayaan berjalan lebih baik.

Sehingga dengan adanya strategi pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi yang berkarakter tentunya akan mampu menghasilkan sektor perdagangan dan industri yang berdaya saing, hal ini membuat peneliti tertarik untuk menguak lebih jauh mengenai pemberdayaan UMKM yang mampu meningkatkan daya saing di sektor perdagangan dan industri serta mengangkat perekonomian rakyat Kota

Madiun. Sehingga peneliti mengambil judul, "**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI"** (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR dan UMKM Kota Madiun)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun?
2. Apakah indikator utama penentu daya saing dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun.

2. Untuk mengetahui indikator utama penentu daya saing dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
   b. Dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Madiun sendiri yang dapat dipergunakan sebagai dasar, atau pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lebih lanjut guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini dilakukan dalam hal ini kaitannya tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
   c. Diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing di sektor industri dan perdagangan melalui pemberdayaan UMKM, agar mampu berdaya saing dipasar dan produknya laku dipasaran.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing sektor industri dan perdagangan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Sebagai tambahan referensi dan wacana bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksud agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari proses penelitian yang berisikan tentang pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian serta yang akan menjadi fokus penelitian. Ketiga, tujuan penelitian dimana

berisikan tentang hal-hal yang telah dicapai atau ditemukan. Keempat adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Kelima adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori atau pendapat sarta konsep-konsep yang dapat mendukung dan berhubungan dengan topik penulisan skripsi sebagai landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Teori, pendapat ataupun konsep-konsep yang ada dalam bab ini merupakan kutipan dari berbagai ahli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, dimana bab ini membahas tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat diperoleh ketika mangambil data yang termuat dalam jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik kesimpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan gambaran umu mengenai lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan menyajikan data-data dari hasil penelitian serta menyajikan data umum yang merupakan gambaran obyek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian yaitu strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri (Studi pada Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis data. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan pada ketidaksesuaian teori dengan kenyataan dilapangan dan diharapkan sebagai bahan pembangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Kartasasmita (1996:9) merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Berbicara tentang administrasi pembangunan, terkadang kita akan beranggapan bahwa administrasi ini adalah suatu sistem administrasi yang dipakai oleh negara-negara berkembang. Kartasasmita juga menyebutkan bahwa administrasi pembangunan pada umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang, walaupun memang negara berkembang banyak sekali cara untuk mengkategorikannya. Lebih lanjut Kartasasmita menyebutkan bahwa negara-negara berkembang baik yang terjajah maupun yang tidak kebanyakan mengikuti etika administrasi barat. Khusus bagi negara yang pernah dijajah, maka sistem administrasi yang dianut akan mengikuti penjajahnya, maka dikenallah dengan sebutan administrasi kolonial. Secara *de facto* sistem administrasi yang dipakai negara kolonial berbeda dengan yang dipakai negara jajahannya.

Seperti yang diakui oleh Kristiadi (1997:2) bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi

negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti di atas, Kristiadi memberi pengertian tentang administrasi pembangunan adalah "Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian". Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan yang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju.

Dasar inilah Tjokroamidjojo (1985) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *development of administration* (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah"*Administrative Reform*" (Reformasi Administrasi).
2. Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development* (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi atas dua, yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

3. Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yang diuraikan diatas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Tjokroamidjojo (1985:26) membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik dan berorientasi masa depan, secara efektif atau tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan dapat memainkan peranan penting dalam melangsungkan perubahan yang bersifat membangun, yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan peran ini secara baik ialah bila terdapat sumber-sumber kekuasaan lain yang mempunyai kekuasaan untuk secara terus meningkatkan administrasi pada tanggungjawabnya. Karena dampak faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi para administrator diharapkan mampu sepenuhnya menguasai administrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi dan proyek pembangunan,

sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam kegiatan pembangunan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang. Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan atau ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggerak perubahan (*change agent*), sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

B. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pemerintah Daerah/Lokal

1. Pengertian Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*de*" berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi dalam arti *self government* menurut Smith (1985:11) berkaitan dengan adanya subsidi teori yang memiliki *self government* melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat didaerah pemilihan tertentu. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Desentralisasi itu sendiri menurut Wasistiono (2002:15) yang mengutip pandangan Litvack menyatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintahan yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan, urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalan sistem Negara Kesaatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan sendiri kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pimpinan rakyat di daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat didaerah. Sebagai kepala daerah otonom, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, karena melibatkan sebesar-besarnya pesan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif, efektif dan efisien serta bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai esensi prinsip transparansi.

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Supriatna, 1992:19), desentralisasi dalam bentuk yang murni mempunyai karakteristik mendasar sebagai berikut:

a. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Puat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut.
b. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis yang jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi publik.
c. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber-sumber untuk menjalankan fungsi-fungsinya.
d. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintah lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh.

Desentralisasi dapat pula dilihat sebagai pembalikkan konsentrasi kekuasaan pemerintahan pada satu pusat, dan memberikan kekuasaan tersebut kepada pemerintah-pemerintah setempat. Desentralisasi secara luas mencakup delegasi kekuasaan atau fungsi kepada jenjang-jenjang yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah jenjang tersebut adalah satu dari unit-unit pemerintaha di dalam suatu negara, atau jawatan-jawatan dalam organisasi berskala besar. Desentralisasi sebagai sebuah kondisi, diperlukan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam perspektif Cheema dan Rondinelli (1983), *rationale* untuk kebijakan desentralisasi antara lain sebagai berikut:

a. Memungkinkan pejabat-pejabat untuk menyusun dan menyesuaikan rencana serta program pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen.
b. Mampu memotong sejumlah besar *read tape* dan prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan *over concentration* kekuasaan atau sumber-sumber dipusat.
c. Kontrak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat-pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan keduanya untuk mendapatkan informasi yang lebih baik guna

memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.

d. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber-sumber, desentralisasi memungkinkan keterwakilan yang lebih besar untuk bermacam-macam kelompok politik, agama, etnis, dan suku.
e. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat-pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan manajerial dan teknis. Dengan desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat tersebut untuk menangani urusan-urusan.
f. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat-pejabat pusat dari tugas-tugas ruti dimana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat-pejabat lokal. Ini akan memnungkinkan pejabat-pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.

Rondinelli dan Cheema (1983) juga mengemukakan empat bentuk desentralisasi, yaitu:

a. Dekonsentrasi yaitu desentralisasi dekonsentrasi pada prinsipnya merupakan bentuk desentralisasi ekstensif (kurang luas) lebih kepada pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen pemerintah kepada pejabat staff yang berkantor diluar ibu kota negara. Terbuka kemungkinan tidak diberinya kewenangan memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang diemban atau dibebankan kepadanya seharusnya dilaksanakan.
b. Delegasi yaitu melimpahkan kewenangan manajerial dan pembuatan keputusan, khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi publik khusus atau tertentu pada organisai-organisasi tertentu yang hanya dikontrol secara tidak langsung oleh departemen pusat. Tidak jarang, dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya ternyata organisasi mempunyai tingkatan yang lebih independen. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan contoh desentralisasi pada tingkat delegasi.
c. Devolusi merupakan bentuk desentralisasi tertinggi, desentralisasi paling extensif. Prinsip-prinsipnya meliputi pemberian otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada pemerintah daerah, serta kontrol yang relatif kecil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki wilayah yang kewenangan hukumnya jelas dan berhak menjalankan segala

kewenangan guna melaksanakan fungsi-fungsi publik dan pemerintah.

d. Transfer fungsi/penyerahan pemerintahan kepada *Nongo Government Institution.* Desentralisasi bentuk ini diberikan melalui perencanaan dan tanggung jawab administratif, fungsi-fungsi publik dari lembaga pemerintah kepada tenaga sukarela (*voluntary*), swasta, lembaga-lembaga non pemertintah. Dalam kasus tertentu pemerintah melakukan transfer perencanaan dan tanggung jawab administratif kepada organisasi di luar pemerintah secara paralel.

Adanya desentralisasi, menyebabkan adanya pelimpahan kewenngan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka dengan ini terwujudlah konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah/Lokal

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos*=sendiri dan *momos*=Undang-Undang, yang berarti perundangan tentang otonomi, diantaranya yaitu Manan (1994) yang mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta tanggung jawab badan pemerintah untuk mangatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manivestasi desentralisasi. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Mahwood (dalam Agusniar, 2006) yaitu kebebasan dari pemerintah daerah dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kekuasaan umum disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Priyatmoko (dalam Mogid, 2000:15) memberikan beberapa karakteristik otonomi daerah sebagai berikut:

a. Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
b. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya.
c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagai komponen dalam masyarakat.
d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi ke arah penyelenggaraan *good* dan *clean governance*.
e. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.
f. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah hendaknya menjadi lebih efisien dan efektif.

Otonomi daerah mekanisme pemberdayaan masyarakat daerah, dengannya daerah mempunyai kekuasaan untuk mengontrol dirinya melalui pembuatan kebijakan publik (Fitriyah, 2001:111). Selanjutnya Fitriyah (2001:112) mengungkapkan adanya aspek positif keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, disamping itu otonomi daerah lebih menjamin terakomodasinya berbagai kepentingan lokal, karena pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.

Berdasarkan pengertian dan beberapa karakteristik di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang memiliki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut segala urusan daerah menjadi kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Hakekat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam rangka pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah dalam kerangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kushandajani (2001:64), otonomi diarahkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah antara lain untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses

pertumbuhan. Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya kabupaten/kota ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula dapat tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, hakekat otonomi daerah berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah mengurus rumah tangganya sendiri dan lebih menitikberatkan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan didaerah dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan fisik ketentraman, dan ketertiban umum.

c. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pemberlakuan alasan otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih kanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutya pada ayat (5) tertulis, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Secara khusus, pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah yaitu Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
f. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua.

d. Jenis-Jenis Otonomi

Dalam suatu otonomi terdapat jenis-jenis yang menjadi bagian di dalamnya misalnya seperti berikut:

a. Negara Serikat

Negara serikat (federasi) adalah negara yang bersusunan jamak, maksudnya negara ini terdiri dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Negara-negara bagian itu kemudian menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan untuk diselenggarakan oleh suatu pemerintah federal, sedangkan urusan-urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian. Ramlan Surbakti (2010:216) menambahkan bahwa dalam negara serikat pemerintah negara bagian bukanlah bawahan dan tidak bertanggungjawab kepada pemerintah federal.

Stronk (dalam Hendratno 2009:53) menjelaskan tentang dua syarat dasar pembentukan negara serikat yang sebenarnya. Stronk menyatakan bahwa jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penyatuan dalam bentuk negara serikat tidak dapat terwujud. Berikut ini syarat pembentukan negara serikat menurut Stronk:

1. Syarat pertama, adalah adanya rasa kebangsaan diantara negara-negara yang membentuk federasi. Kenyataannya, negara-negara federal sebelum menjadi federasi umumnya sudah berhubungan secara terbatas dalam bentuk sebuah konfederasi seperti Jerman atau terikat di bawah penguasa yang sama seperti Amerika Serikat, Swiss, Australia dan Kanada.
2. Syarat kedua, adalah meskipun menginginkan persatuan (*union*), unit-unit yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan (*unity*), karena jika menghendaki kesatuan mereka tidak akan membentuk negara federal, melainkan negara kesatuan.

Negara federal pada awalnya berasal dari negara yang berdiri sendiri dan memiliki kedaulatan sendiri. Akan tetapi karena adanya

kepentingan tertentu seperti ekonomi, politik dan sebagainya mereka membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Ikatan kerjasama tersebut yang kemudian disebut negara federasi yang kemudian memiliki Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Gabungan atau Pemerintah Federasi.

Kranenburg (dalam Hendratno, 2009:52) menjelaskan bahwa ciri negara federal itu terletak pada keberlakuan atau daya mengikat dari suatu peraturan yang diatur oleh pemerintah federal, apakah langsung mengikat sebagaimana biasanya pada negara kesatuan ataukah memerlukan tindakan terlebih dahulu dari pemerintah negara bagian. Berikut ini pendapat Kranenburg tentang ciri negara federal terkait dengan masalah keberlakuan hukum yang dibuat oleh pemerintah federal, yakni:

> "...jika peraturan peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu akan diberlakukan terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka pemerintah negara bagian yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan suatu tindakan, yaitu mengadakan atau membuat suatu peraturan, atau undang-undang atau pernyataan atau mungkin berupa tindakan lain, yang pada pokoknya menyatakan berlakunya peraturan-peraturan hukum dari negara federal atau negara gabungannya itu terhadap warga negaranya".

b. Otonomi Khusus

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik ditingkat

lokal. Pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kemampuan ekonomi.
2. Potensi Luas Daerah.
3. Luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta
4. Pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional, misalnya dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kawasan cagar budaya
2. Taman nasional
3. Pengembangan industri strategi
4. Pengembangan teknologi tinggi (seperti pengembangan teknologi nuklir)
5. Peluncuran peluru kendali
6. Pengembangan prasarana komunikasi
7. Telekomunikasi
8. Transportasi
9. Pelabuhan dan daerah perdagangan bebas

10. Pangkalan militer
11. Wilayah eksploitasi
12. Konservasi bahan galian strategis
13. Penelitian dan pengembangan sumber daya nasional
14. Laboratorium sosial
15. Lembaga pemasyarakatan spesifik

Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut. Mengikutsertakan dalam ketentuan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. Tata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam peraturan pemerintah.

Secara politis otonomi khusus artinya ada perlakuan khusus bagi wilayah atau bangsa. Secara politis otonomi khusus biasanya diberikan kalau ada negara yang didirikan dengan berbagai macam suku bangsa dengan beragam latar belakang sejarah, politik dan hukumnya.

e. Pemerintah Daerah/Lokal

Dengan dianutnya desentralisasi dalam arti luas, maka dibentuklah pemerintahan lokal atau pemerintahan setempat atau *local government* yang memiliki arti bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bagsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan suatu undang-undang, yang memiliki

lembaga/lembaga atau badan/badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut yang dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada dalam wilayah kekuasaannya (Riwukaho, 2001:30).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang disebut pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sebagai akibat dari dianutnya desentralisasi maka dibentuklah daerah-daerah otonom. Yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakel and Bradshaw, 1994).

Berdasarkan fokus penerapannya, tujuan PEL meliputi:

a. Membentuk jaringan kerja kemitraan antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional, dan global.

b. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan PEL.
c. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publi, bisnis, dan masyarakat.
d. Secara kolektif akan mendorong kondisi yang nyaman dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga berkurangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan.

Dalam proses implementasi perencanaan dan penerapan PEL ini menggunakan prinsip pendekatan ekonomi, kemitraan, dan kelembagaan, diantaranya yaitu:

a. Prinsip Ekonomi
    1. Mulai dengan kebutuhan pasar.
    2. Memfokuskan pada kluster dari kegiatan ekonomi yang ada, yang produksinya dijual kedaerah luar (*economic base*) dan *multiplier effect* di daerahnya kuat.
    3. Menghubungkan produsen skala kecil dengan *supplier* kepada perusahaan ekspor.
b. Prinsip Kemitraan
    1. Adanya tanggung jawab dari masing-masing *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai aktor pengembang dan pengelola ekonomi lokal.

2. Masing-masing stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berperan aktif dalam bekerjasama.
3. Kemitraan mengandalkan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar atau asing.
4. Inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar, dan permintaan bukan produksi atau *supply*.

c. Prinsip Kelembagaan

1. Fasilitas dialog diantara stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif.
2. Mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan.
3. Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.

Ketiga prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai strategi pendekatan dan proses perencanaan mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan dalam kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai forum yang terorganisasikan guna memfasilitasi komunikasi antar pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* serta berbagai kelompok yang berkepentingan terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan. Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam PEL berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan, pemberdayaan, efisiensi, dan *good governance*.

Dengan demikian, menurut Blakely dalam Supriyadi (2007:103-123) dalam keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha.
b. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
c. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
d. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Menurut Siagian dalam Suryono (2010:22) pembangunan diartikan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perbuatan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Menurut Sumitro dalam Siagian (1989:43) pembangunan ekonomi ialah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produk sivitet per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skills. Menurut Suryono (2010:32), tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas/volume barang dan jasa, meningkatkan pendapatan, merubah struktur dalam industrialisasi, sedangkan sistem yang dituju adalah produksi dalam perindustrian. Menurut Siagian (2012: 80) strategi pembangunan ekonomi yang biasa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi. Modernisasi pertanian harus dipandang dari dua sisi, sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama

bahan pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agribisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor.

Teori-teori yang berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kemitraan (Partnership)

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerja sama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal begitupun dengan sektor privat (swasta).

Kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan baik ditingkat lokal dan internasional menjadi kebutuhan yang urgen bagi pemerintah. Dalam posisi seperti ini, kebijakan negara sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif dalam negeri tetapi juga fungsi strategis dalam hubungan international. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pariwisata di satu negara tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan

kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat. Kebijkan kelembagaan kemitraan antar pemerintah, masyarakat, dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.

Dalam model kemitraan 3 (tiga) pihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga, secara keseluruhan relasi ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembagunan ekonomi daerah. Dalam kotak di tengah relasi ketiga pihak, Syahrir menunjukkan adanya manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas (masyarakat). Dalam hubungan kemitraan tersebut di atas, masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri:

1. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai daerah tujuan investasi, pelibatan departemen terkait (industri, tenaga kerja, dan sebagainya), serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal.
2. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk

> mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan. (Syahrir, 2003, dalam Modul Materi Bintek Kemitraan Otonomi Daerah, Depdagri dan JICA, 2004).

b. Teori Kapasitas Kelembagaan Lokal

Membicarakan penguatan kelembagaan lokal tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelembagaan secara teoritik. Kata "kelembagaan" merupakan padanan dari bahasa Inggris "*Institution*" atau lebih tepatnya "*social institution*". Menurut Rahardjo (1999:157), secara ringkas lembaga sosial (*social institution*) dapat diartikan sebagai kompleks norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam kultur dan struktur. Dalam suatu lembaga, setiap orang yang termasuk didalamnya pasti memiliki status dan peran tertentu. Status merupakan refleksi dari struktur, sedangkan peran merupakan refleksi dari kultur. Istilah kelembagaan memberi tekanan kepada lima hal berikut ini:

1. Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang disebut Cooley dengan *public mind*, atau "wujud ideal kebudayaan". Secara garis besar, hal

yang dimaksudkan terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide, *belief*, dan moral.

3. Berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat mores (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.
4. Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
5. Kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah.

Dari kelima tekanan pengertian diatas terlihat bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola dan berpusat pada sekitar tujuan-tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Jadi, dalam hal ini keberadaan lembaga merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena selain mengingat fungsinya yang urgent yaitu untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang tinggi dalam masyarakat juga terkait dengan pencapaian berbagai macam kebutuhan manusia. Dalam kajian sosiologi dikenal dua *grand theories* yang umum dikenal adalah teori struktur fungsional dan teori konflik. Menurut kelompok fungsionalis, masyarakat adalah ibarat tubuh manusia, dimana sekecil apapun tiap sel dalam tubuh tersebut, memiliki fungsinya sendiri. Hal ini ibarat individu dan juga kelembagaan dalam masyarakat. Tiap bagian manjalankan perannya dan saling menyumbangkannya demi kebaikan bagi semua. Dalam konteks itu, maka kelembagaan sebagai

komponen utama dalam masyarakat, berjalan dalam keteraturan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Kelembagaan menjadi kontrol sosial atau alat untuk menjaga keteraturan sosial dan juga menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan juga bertugas untuk menyiapkan individu-individu untuk menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan tatanan yang sudah terbentuk.

c. Teori Kolaborasi

Menurut Jamal dan Getz (1995 dalam William, 2005) yang diperlukan dalam partnership adalah kolaborasi bukan kooperasi (kerjasama) dalam jangka pendek. Substansi kolaborasi dalam kemitraan (*partnership*) ini tidak sepenuhnya mudah dijelaskan batasannya. Kolaborasi sudah mencakup jejaring hubungan antara pemerintah, privat (perusahaan) dan NGO yang mempunyai perbedaan tipe kegiatan kolaborasi dengan kegiatan interorganisasional ;ain yang didorong oleh pasar dan mekanisme kontrol hirarki.

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan/atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan, presepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkn suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak

pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini.

Sektor publik adalah bidang kajian yang berkaitan dengan publik/masyarakat. Kajian sektor publik bisa diidentifikasikan terdapat tiga elemen didalamnya yaitu *government, civil society,* dan *privat sector*. Mardiasmo mendefinisikan sektor publik sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2004:2). Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dann organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memilik pengaruh yang

signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2004:1).

Organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklarifikasikan ke dalam tujuh hal yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bermotif mencari keuntungan
2. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak
3. Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan
4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi
5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan
6. Dominasi profesional
7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Kolaborasi sektor publik dengan demikian dipahami sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagai tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan presepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari *government, civil society*, dan *privat sector*. Tujuan

utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

D. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli yang intinya menyatakan bahwa strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Glueck dan Jauch (1998:12) yang mengatakan strategi adalah rancana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kemudian strategi menurut Ansoff dalam Rowe (2008:18) adalah sebagai berikut:

> *"... a set of management guidelines which specify the firm's product-market position, the directions in which the firm seeks to grow and change, the competitive tools it will employ, the means by which it will enter new markets, the manner in which it will configure its resources, the strengths it will seek to exploit and conversely the weaknesses it will seek to avoid. Strategy is a concept of the firm's business which provides a unifying theme for all of its activities."*

Sedangkan konsep strategi menurut Richard Vancil dalam Steiss (2003:2) yaitu sebagai berikut:

> *"a conceptualization, expressed or implied by the organization's leader, of (1) the long-term objectives or purposes of the organization, (2) the broad constraints and policies . . . that currently restrict the scope of the organization's activities, and (3) the current set of plans near-term goals that have been adopted in the expectation of contributing to the achievement of the organization's objective"* .

Jadi, dari beberapa teori yang ada bahwa strategi adalah seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan untuk memperoleh keunggulan kompetisi dalam pasar agar lebih baik dari para pesaingnya.

2. Level Strategi

Menurut Tjiptono (2000:8) dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis dan level fungsional.

a. Strategi Level Korporasi

Strategi level korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu. Pertanyaan pokok yang muncul pada level korporasi adalah:

1. Bisnis apa yang seharusnya digeluti perusahaan.
2. Apa sasaran dan harapan atas masing-masing bisnis.

3. Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dalam menghadapi saasaran level korporasi, setiap perusahaan perlu menentukan salah satu dari beberapa alternatif berikut:

1. Kedudukan dalam pasar
2. Inovasi
3. Produksivitas
4. Sumber daya fisik dan finansial
5. Profitabilitas
6. Prestasi dan pengembangan manajerial
7. Prestasi dan sikap karyawan
8. Tanggung jawab sosial

b. Strategi Level Unit Bisnis

Strategi level unit bisnis lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi bisnis tertentu. Pada dasarnya strategi level unit bisnis berupaya menentukan pendekatan yang sebaik-baiknya oleh suatu bisnis terhadap pasarnya dan bagaimana melaksanakan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang dalam kondisi pasar tertentu.

c. Strategi Level Fungsional

Strategi level fungsoional merupakan strategi dalam kerangka fungsi manajemen (secara tradisional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi dan operasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia) yang dapat mendukung strategi level unit bisnis.

3. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki tiga peranan dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
b. Strategi sebagai saran koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
c. Strategi sebagai target. Konsepstrategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan dimana erusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi,tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

Adapun model-model pembuatan strategi yang dikemukakan oleh Wahyudi (1996:100) yaitu :

a. Model Enterpreneur (*Enterpreneural Mode*). Dalam model ini pimpinan yang sangat aktif mencari peluang-peluang baru, sehingga pimpinan yang mempunyai kekuatan dalam bisnis, berani mengambil resiko tinggi dalam saat-saat krisis dari pada hanya mengandalkan pada alternatif aman. Model ini bisa digunakan oleh perusahaan (pondok) yang masih muda atau masih kecil dengan tujuan utama adalah pertumbuhan.
b. Model penyesuaian (*Adapive Mode*). Model ini dicirikan oleh pembuat strategi sebagai reaksi dari timbulnya suatu masalah, sehingga pembuat strategi harus flexible dan mudah beradaptasi pada lingkungan yangdinamis dan komplek.
c. Model Perencanaan (*Planing Mode*). Model ini menitik beratkan pada analisis sistematis yang dilakukan berdasarkan analisa biaya dan keuntungan. Perencanaan strategi jangka panjang dibuat pada saat lingkungan berada dalam keadaan stabil.tujuan dari

perusahaan (pondok) yang menganut pada model ini adalah model efisiensi dan pertumbuhan.

4. Manajemen Strategi

Manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (1997:20) yaitu manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Kemudian manajemen strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:6) adalah "Sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan".

Sedangkan menurut David (2004:5) manajemen strategi adalah "Seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifitasnya". Selain itu managemen strategi menurut David dalam Steiss (2003:6) yaitu:

> *"the art and science of formulating, implementing, and evaluating crossfunctional decisions that enable an organization to achieve its objectives. As this definition implies, strategic management focuses on integrating management, marketing, finance/accounting, production/operations, research anddevelopment, and computer information systems to achieve organizational success".*

Sedangkan manajemen strategi menurut Rowe, Mason, and Dickel dalam Steiss (2003:7) yaitu sebagai berikut:

> *"seen as a "total" system perspective and not merely as the process of choosing from among alternative long-range plans. It reflects the organization's "strategic capability" to balance the demands imposed by external and internal forces and to integrate the overall functioning of the organization so as to allocate resources in a manner best designed to meet goals and objectives".*

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik, karena berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian adalah karena kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, selalu berubah-ubah pula.

Manfaat manajemen strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:21) adalah:

a. Manajemen strategi merupakan satu cara mensistematisasi berbagai keputusan bisnis yang paling penting. Bisnis mencakup resiko besar dan manajemen strategi berusaha menyediakan data sehingga spekulasi yang beralasan dan berinformasi dapat dilakukan kalau perlu.
b. Manajemen strategi membantu mendidik para manajer agar menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini juga membantu meneliti masalh pokok perusahaan.
c. Manajemen strategi membantu meningkatkan komunikasi perusahaan, koordinasi, proyek perorangan, alokasi sumber daya dan perencanaan jangka pendek seperti penyusunan anggaran.

Meskipun strategi merupakan suatu konsep yang komprehensif, tetapi strategi dapat diformulasikan serta diterapkan pada berbagai macam tingkatan dalam organisasi dan aktivitas perusahaan. Berdasarkan sifatnya

yang fleksibel tersebut, maka Wahyudi (1996:23) membagi manajemen strategi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

a. Strategi Korporat, dalam penyusunan strategi korporat, oleh para pemimpin puncak, akan didefinisikan industri dimana perusahaan akan bersaing dan juga dikembangkan suatu rencana jangka panjang dari organisasi. Strategi ini berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber daya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi dengan menyatukan unit-unit bisnis yang berbeda menjadi suatu strategi organisasi yang menyeluruh. Keputusan dalam strategi ini mencakup investasi dalam diverifikasi, integrasi vertikal, akusisi dan penciutan.
b. Strategi Bisnis, strategi bisnis lebih menitikberatkan pada pembuatan keputusan-keputusan strategik yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah produk atau pangsa pasar tertentu pada sebuah divisi. Jika perusahaan ingin menang atau sekear bertahan hidup dalam suatu industri maka ia harus mengadopsi sebuah strategi bisnis yang dapat menciptkan keunggulan bersaing atas para pesaing sehingga strategi bisnis sering disebut dengan strategi bersaing.
c. Strategi Fungsional, strategi ini berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang menyangkut divisi-divisi pendukung dalam rangka memproduksi dan memasarkan produk hingga sampai ditangan pelanggan. Strategi ini lebih bersifat operasional karena akan langsung diimplementasikan oeh fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemn produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia.

E. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah

1. Definisi Strategi Daya Saing Daerah

Pada bahasa asing kata "*global competitiveness*", diartikan sebagai "daya saing global". Kata *"competitive advantage"* menurut Poter (dalam Sumihardjo 2008:8) diartikan sebagai "keunggulan bersaing", dan kata *"competitive strategy"* diberi arti "Strategi Bersaing". Jelaslah kalimat daya saing adalah sama dengan *competitiveness* atau *competitive.*

Dalam bahasa lain Sumihardjo (2008:8) mengatakan bahwa kalimat daya saing dimaknai secara bebas. Kata daya dalam kalimat daya saing bermakna kekuatan dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain atau beda dengan yang lain dari segi mutu atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau institusi tertentu.

Konsep daya saing dikemukakan oleh Abdullah (dalam Sumihardjo 2008:8-9) adalah "konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global dari pesaing yang ada di lingkungan wilayahnya". Berbicara daya saing maka erat hubungannya dengan kemampuan ekonomi daerah untuk ikut dalam persaingan. Syafar dalam Muktianto seperti yang dikutip Sumihardjo (2008:9) lebih dalam menyatakan bahwa kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar secara berkesinambungan.

Konsep lain tentang daya saing seperti yang dikemukakan oleh Porter (dalam Sumihardjo 2008:10) dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam membahas daya saing yaitu:

a. Strategi bersaing adalah suatu bidang yang menjadi perhatian utama para manajer, yang sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai industri dan para pesaing. Strategi bersaing

membahas cara dengan mana perusahaan dapat bersaing secara lebih efektif untuk memperkuat posisi pasarnya.

b. Pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi keuatan-kekuatan ekonomi, aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industi atau industri-industri dimana perusahaan tersebut bersaing.
c. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat menyokong kinerjanya, seperti inovasi, budaya kohesif, atau pelaksanaan yang baik.
d. Strategi bersaing bertujuan menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu pemahaman dasar dari strategi bersaing kemudian pemahamn tersebut diadopsi dan dijadikan dasar pemahaman daya saing. Selanjutnya oleh Sumihardjo (2008:11) mendefinisikan daya saing yaitu:

a. Daya saing adalah kemampuan untuk meningkatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan.
b. Daya saing adalah aktivitas mengukur dan membandingkan untuk mengetahui seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan.
c. Daya saing daerah adalah kemampuan memadukan faktor kondisi lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk memperkokoh posisi daerahnya.

2. Daya Saing Berbasis Potensi Daerah

Kata kunci pemahaman daya saing berbasis potensi daerah menurut Sumidardjo (2008:12) terletak pada kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya. Kemampuan menjadi unggul merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas sumber-sumber yang dimiliki daerah agar menguntungkan masyarakat daerah.

Konsep ptensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata (*tangible*) seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata, seperti keterampilan, keahlian, proses dan moral. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Produk Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan.

Potensi daerah yang disimpulkan Mukianto (dalam Sumihardjo 2008:12) merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sumihardjo (2008:12) potensi daerah pada umumnya meliputi:

a. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, holtikultura, perhutanan, perikanan, dan perternakan.
b. Potensi bidang kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan.
c. Potensi energi dan sumber daya mineral seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa.
d. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa,konstruksi, transportasi, dan pariwisata.
e. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.

3. Daya Saing dengan Strategi Berbasis Potensi Daerah

Menurut Sumihardjo (2008:8) jika merujuk pada kata daya saing adalah upaya atau usaha untuk menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau institusi tertentu. Kata strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Sedangkan kata kunci dari berbasis potensi daerah menurut Sumihardjo (2008:11) adalah kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya.

Jadi jika dihubungkan antara daya saing dengan strategi berbasis potensi daerah adalah sama-sama berupaya untuk menjadi unggul. Hanya dengan ditambah kata strategi dalam konsep strategi berbasi potensi daerah, maka berubah menjadi tindakan atau action yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

4. Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah

Menurut Abdullah (2002) dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia menyatakan bahwa indikator penentu daya saing daerah adalah perekonomian daerah, keterbukaan,

sistem keuangan, infrastruktur, dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, *Governance*, dan kebijakan pemerintah, dan manajemen dan ekonomi makro.

Indikator makro daya saing merupakan jaringan antar indikator dan sub-sub indikator yang saling *intercorect*, saling hubungan secara terikat dan terkait *(inheren dan cohern)* antar dan lintas indikator dan sub indikator, yang pada implementasinya memerlukan pengelolaan yang terintegratif, terencana dan konsisten serta berkesinambungan diantara sembilan indikator penentu daya saing. Implementasi terintegrasi, mengandung makna bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan perekonomian daerah secara makro sudah barang tertentu melibatkan semua pihak, baik institusi pemerintah daerah, swasta dan lembaga sosial, seta pihak-pihak secara langsung dan tidak langsung secara nyata andil dalam penggerakan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Terencana, asumsi langkah perencanaan adalah untuk memperkecil kegagalan, artinya aktivitas pengembangan daya saing akan gagal total tanpa perencanaan, dan peluang untuk berhasil lebih besar apabila diawali dengan perencanan yang baik. Konsisten, menunjukan kepada langkah *sentripetal* yakni gerak yang mengarah sesuai perencanaan atau gerak taat asas, tidak mengerjakan yang tidak terencanakan, taat asas merupakan perwujudan dari konsistensi sebuah kesepakatan, tidak merubah kesepakatan tanpa kesepakatan berikutnya, perencanaan adalah kesepakatan. Adapun berkesinambungan merupakan pekerjaan tiada henti,

akan tetapi terus menerus dilakukan pada tahun pertama diikuti tahun kedua dan seterusnya.

Masing-masing indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
2. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
3. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
4. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

b. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam

cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
2. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
3. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.
4. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
5. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional.

c. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk menfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam menfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
2. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

d. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapnya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip di bawah ini:

1. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
2. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.

3. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

f. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam kal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
2. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menetukan daya saing suatu daerah.
4. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

g. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan maupun mempengaruhi secara positif aktiviatas perekonomian daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.

2. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
3. Aktivitas perekonomian ssuatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

h. *Governance* dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
2. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
3. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
4. Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.

5. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.

i. Manajemen Ekonomi Makro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi makro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah diantaranya adalah:

1. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan mangerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
2. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
3. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
4. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
5. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

F. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:58) menyatakan pendapat beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa ahli yang dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson,et.al,1994)
c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987)
d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut Parson (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa "konsep power dalam masyarakat adalah variabel jumlah". Menurut perspektif tersebut power masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerfull*). Dengan kata lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat menjadi agen pembangunan.

Menurut Wahyono (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa "pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada

pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri". Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam mayarakat termasuk indivudu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam keadaan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pemberdayaan masyarakat tentunya sangat penting untuk membina, membimbing serta mengarahkan masyarakat untuk bisa lebih mandiri. Hal ini tentunya menjadi modal kuat untuk merubah nasib masyarakat misikin untuk lebih berkreasi dan menjadikan kehidupannya

lebih mandiri lagi (segi ekonomi), bisa mencukupi sandang, pangan, papan agar mampu bertahan hidup di era persaingan bebas ini. Konsep pemberdayaan merupakan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai agen pembangunan. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasinya.

2. Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Strategi pemberdayaan begitu dirasa sangat penting guna mencapai suatu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi sutu lawan satu antara pekerja sosial dan link dalam *setting* pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan

melalui kolektivitas. Dalam kontek pekerjaan sosial, Parson dalam (Suharto, 2005:66) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan (*empower setting*): mikro, mezzo, dan makro, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Mikro
   Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).
b. Asas Mezzo
   Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Asas Makro
   Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dengan berpedoman pada strategi utama tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik jika diawali dengan penciptaan pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep tentang strategi pemberdayaan itu sendiri. Karena tidak terpungkiri juga apabila suatu kegiatan berjalan tanpa dilandasi oleh strategi-strategi yang matang maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Untuk itu penerapan strategi yang tepat

terhadap pemberdayaan UKM di Kota Madiun sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini perbaikan taraf hidup masyarakatnya.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya berjalan melalui proses yang tidak cukup sederhana. Menurut Sulistiyani (2004:82) tahap-tahap pemberdayaan meliputi:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dari poin tersebut dimaksudkan bahwa pada tahap ini pihak pemberdayaan/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat langsung merangsang keadaan mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar mampu terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Pada poin ini dimaksudkan bahwa proses transformasi pengetahuan, kecakapan, keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif. Jika tahap pertama lebih terkondisi, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan mereka yang membutuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang terendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pada poin ini

> dimaksudkan bahwa tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan-pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Dalam hal ini pemerintah tinggal sebagai fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (Sulistiyani, 2004:84) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam artian masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat tersebut sehingga masyarakat mempunyai rasa aman untuk ikut dalam proses pembangunan itu sendiri.

G. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sering kali dikaitkan sebagai usaha yang memiliki modal terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM sendiri diartikan secara terpisah. Pengertian UMKM dalam UU Nomor 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

2. Asas dan Tujuan UMKM

Asas-asas UMKM yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 2 antara lain sebagai berikut:

a. Kekeluargaan;

b. Demokrasi ekonomi;

c. Kebersamaan;

d. Efisiensi berkeadilan;

e. Berkelanjutan;

f. Berwawasan lingkungan;

g. Kemandirian;

h. Keseimbangan kemajuan; dan

i. Kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Saiman (2009:7) berdasarkan Bab II pasal 2 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan tentang asas-asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

a. Asas kekeluargaan, yaitu yang menandai upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, berkesinambungan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.
b. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
c. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif,dan berdaya saing.
e. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
f. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
g. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
h. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
i. Asas kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan dari UMKM seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 3 adalah dimana usaha kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

3. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah. Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan prinsip pemberdayaan UMKM itu sendiri menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 4 antara lain:

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selain itu tujuan dari pemberdayaan UMKM yang tercantum pada Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 5 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Kriteria UMKM

Kriteria yang harus dimiliki UMKM untuk membentuk bidang usahanya dalam UU Nomor 20Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode yang

diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Strategi yang matang akan membuat proses pemberdayaan akan berjalan lebih baik. Menurut Situmorang (2008:87) strategi pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya:

a. Peningkatan Kualitas SDM
   Poin tersebut dimaksudkan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kegiatan sentral yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Namun demikian berbagai indikasi menunjukkan bahwa bentuk pendidikan formal tidak semua dapat menjamin peningkatan pengetahuan dari kelompok UMKM. Sebaliknya ada indikasi, bahwa sebagian UMKM tumbuh motivasi keterpaksaan karena mereka tidak mendapat lapangan kerja atau belum mendapatkan lapangan pekerjaaan yang sesuai. Dengan demikian nampaknya dari aspek pendidikan formal sebagian UMKM sudah cukup baik tetapi dari keterampilan atau profesionalisme kondisi mereka masih perlu dipertanyakan. Dari sebab itu berbagai upaya yang telah dilakukan sendiri oleh UMKM antara lain adalah dengan belajar sendiri-sendiri (otodidak) atau ikut magang pada usaha sejenis yang telah ada sebelumnya.
b. Perijinan Usaha UMKM
   Sulitnya mendapatkan perijinan merupakan masalah kedua yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh UMKM. Masalah ini semakin rumit dengan diberlakukannya otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang tidak semua sejalan dengan peraturan pemerintah. Penataan dan penyempurnaan peraturan daerah (Perda) perlu dilakukan dalam rangkan mendukung pemberdayaan UMKM. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM merupakan satu-satunya solusi yang dapat disarankan, karena UMKM tidak dapat melakukan upaya apapun selain mengeluarkan biaya (yang relatif tinggi) untuk mengatasi masalah perijinan ini.
c. Peningkatan Permodalan
   Peningkatan permodalan bagi UMKM dilakukan antara lain melalui program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun diharapkan

mampu untuk memberikan bantuan modal bagi jalannya kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Madiun sendiri. Pemberian modal tersebut diupayakan mampu membantu para masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

d. Peningkatan Kualitas Teknologi
Program ini sudah direncanakan dan mungkin sudah dilaksanakan ditempat lain tetapi di lokasi sampel belum ditemukan, walaupun sudah dinyatakan ada. Salah satu faktor yang manghambat program ini adalah prosedur pengajuan dan pengiriman barang ke daerah yang banyak memakan waktu (terlalu lama) dengan banyak pos pemberhentian. Untuk mempercepat proses pengiriman sebaiknya diberikan dalam bentuk uang karena harga barang yang dikirim bisa lebih mahal daripada dibeli dilokasi UMKM calon pengguna. Demikian juga kesiapan SDM pengguna (operator), persiapannya harus dilakukan jauh-jauh hari, tetapi ini semua memang sangat sulit karena untuk proses pengajuannya saja sudah memakan waktu yang cukup panjang. Dari hasil pengamatan lapang juga perlu dikemukakan bahwa pengembangan teknologi produksi tidak harus selalu diorientasikan pada perkembangan teknologi introduksi, tetapi juga harus dipertimbangkan adanya pengembangan teknologi oleh masyarakat lokal yang jika difasilitasi oleh pemerintah mungkin hasilnya juga lebih baik dari teknologi yang diintoduksi. Demikian juga penelitian dan pengembangan teknologi produksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian perlu mendapat dorongan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya dengan melakukan lomba dan sayembara. Hasil pengamatan lapang memperlihatkan kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan perkuatan hampir semuanya belum melakukan pergantian teknologi. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang adanya teknologi yang lebih bagus. Mereka juga mengatakan bahwa teknologi yang mereka gunakan masih cukup efisien dan mereka tidak memiliki modal untuk mengganti teknologi yang digunakan sekarang ini.

e. Pengembangan Pasar UMKM
Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Teori ekonomi menjelaskan bahwa konsep pemasaran meliputi 4 unsur pendukung yaitu produk, harga, tempat atau lokasi dan promosi produk. Keempat aspek ini saling terkait dalam meningkatkan fungsi pemasaran. Dari keempat unsur tersebut promosi dalam upaya memperkenalkan produk dan mengembangkan jaringan pasar merupakan kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh UMKM baik secara mandiri maupun dengan bantuan para stakeholder terutama pemerintah. Kegiatan ini memang memiliki posisi strategis sebagai faktor kunci yang menghubungkan atau

memperkenalkan produk yang dihasilkan UMKM kepada konsumen atau pasar. Pengertian promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan UMKM dan produknya kepada konsumen, sehingga UMKM dapat eksis dan permintaan terhadap produknya meningkat. Dengan dikenalkannya produk UMKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume usaha UMKM. Dari adanya peningkatan volume usaha diharapkan UMKM dapat meningkatkan laba. Meningkatnya laba akan berdampak pada meningkatnya tabungan (*saving*) yang dapat mendukung upaya perluasan skala usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, promosi harus dilakukan secara profesional dalam artian pelakunya (pengusaha) harus dapat memilih bentuk promosi yang memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi. Untuk tujuan tersebut produsen harus mengalokasikan sejumlah sumber daya baik dana, waktu, maupun tenaga yang jumlahnya bisa cukup besar. Oleh sebab itu, untuk ikut dalam kegiatan promosi, UMKM sejak awal harus memperhitungkan kelayakan, keikutsertaannya dalam program promosi. Beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh UMKM sebagai produsen adalah kelayakan penggunaan dana, jenis barang yang akan dipasarkan, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer, selera konsumen atas barang tersebut, trend atau mode serta faktor-faktor eksternal lainnya. Beberapa kegiatan promosi yang paling banyak dilakukan baik oleh UMKM maupun para *stakeholder* adalah berupa pameran, *trading board*, misi dagang dan temu bisnis, baik didalam maupun diluar negeri. Pada kegiatan ini, UMKM memperkenalkan berbagai jenis produknya dengan tujuan utama untuk memperoeh pembeli (*buyers*). Dalam berbagai jenis pameran atau festival, banyak terbuka peluang bagi UMKM untuk menjual produknya secara langsung, tetapi penjualan langsung ini umumnya kurang menguntungkan karena laba yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

6. Kelebihan dan Kelemahan

a. Kelebihan

Usaha kecil mempunyai beberapa kekuatan. Tambunan (1999:180-120) menyatakan bahwa, beberapa kekuatan yang dimiliki oleh usaha (industri) kecil, yaitu sebagai berikut:

1. Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata pertahun masih sangat tinggi.
2. Usaha (industri) kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal yang tinggi, melainkan keahlian khusus yang dapat di miliki warga setempat lewat sumber-sumber informal.
3. Banyak usaha (industri) kecil yang membuat produk-produk yang bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-ukiran dari kayu, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah.
4. Secara umum, kegiatan usaha (industri) kecil di Indonesia masih sangat agricultural based, karena memang banyak komoditas-komoditas pertanian yang dapat diolah dalam industri kecil.
5. Pengusaha-pengusaha lebih banyak menggantungkan diri pada uang sendiri atau pinjaman dari sumber informal untuk modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah.

b. Kelemahan

Menurut Tambunan (1999:118-120) usaha kecil mempunyai beberapa kelemahan dan permasalahan yang dihadapi. Beberapa kelemahan dan permsalahan yang dihadapi oleh usaha (industri) kecil, terletak pada:

1. Tingkat daya saing global yang masih lemah
2. Diversifikasi produk usaha yang rendah
3. Masih terdapat masalah-masalah lainnya yang dihadapi usaha (industri) kecil yang menjadi suatu kendala serius bagi perkembangan dan pertumbuhan usaha (industri) kecil. Masalah-masalah tersebut yaitu: Keterbatasan dana, baik untuk modal kerja dan investasi; Kesulitan dalam pemasaran distribusi dan input-input lainnya; Keterbatasan sumber daya manusia denga kualitas yang baik; Pengetahuan atau wawasan yang minim mengenai bisnis; Tidak adanya akses ke informasi dan keterbatasan teknologi.

Pemilik (Pengusaha) usaha kecil juga dihadapkan pada beberapa kelemahan dalam mengelola bisnisnya, antara lain:

1. Tidak adanya atau kekurangan Spesialisasi Bisnis yang saat ini sangat spesialis. Individu pemilik usaha kecil tidak mempunyai spesialisasi keahlian dalam seluruh manajemen. Mereka bertanggung jawab terhadap personel, pembelian, keuangan advertensi, dan operasi harian. Hal ini merupakan kelemahan bagi pemilik usaha kecil dalam manajemen, sebab seorang pemilik usaha kecil dapat berada dan melakukan kegiatan pada seluruh sisi perusahaannya.
2. Kenaikan kebutuhan modal. Dalam usaha kecil,sejak pemilik atau beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha membicarakan tentang modal, jawabannya adalah terbatas. Tidak seperti halnya dalam perusahaan besar, dalam bisnis usaha kecil tidak dapat tumbuh atau meningkat dalam jumlah besar, karena aliran kas dalam kegiatan dari hari ke hari serba terbatas. Oleh karena itu, apabila mereka melakukan ekspansi, akan mengalami kesulitan dalam mencari atau memperoleh modal.
3. Kualifikasi pekerja. Dalam usaha kecil, pada umumnya tidak mempunyai program untuk pendidikan dan pelatihan. Mereka hanya memberikan kepada pekerjanya berupa hadiah, dan kemungkinan promosi jabatan terbatas. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi usaha kecil dalam kualifikasi pekerjanya (Vernon, 1981:146).

Usaha kecil juga mempunyai beberapa faktor penyebab kegagalan usaha, diantaranya adalah:

1. Ketidakmampuan mengelola dan faktor langsung lainnya,
2. Kekurangan atau keterbatasan modal,
3. Tidak efisien struktur modal perusahaannya,
4. Kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam promosi penjualan,
5. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan piutang yang macet,
6. Tidak mempunyai konsep kebijaksanaan kredit,
7. Lemah dalam perencanaan bisnis (Lerner, 1986 dalam Helmy, 2008).

Dari beberapa uraian tersebut, menujukkan bahwasannya usaha kecil mempunyai beberapa karakteristik khusus dan unik, serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 2005:63).

Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Maka, dari penelitian deskriptif kualitatif yang menjadi jenis penelitian peneliti sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentang strategi pemerintah daerah

dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri antara lain:
   a. Peningkatan permodalan
   b. Pengembangan pasar UMKM
   c. Peningkatan kualitas SDM
   d. Peningkatan kualitas teknologi.

2. Indikator utama penentu daya saing dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri antara lain:

a. Efektif
b. Efisien
c. Inovatif.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2005) menyatakan bahwa cara yang baik dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif yaitu pergilah dan jejakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan substansi yaitu bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terhadap rumusan masalah yang menjadi penelitian peneliti. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pemerintah daerah Kota Madiun. Sedangkan situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti menangkap atau fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data. Adapun situs penelitian dalam

penelitian ini adalah DiSPERINDAGKOPPAR bagian UMKM Kota Madiun, serta pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun berada di Jl. Salak No.67 Madiun. Situs ini dipilih oleh peneliti dikarenakan data yang terkait dengan penelitian terdapat pada instansi terkait.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan data-data. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari Dinas yang bergerak dibidang UMKM Kota Madiun serta pelaku UMKM Kota Madiun itu sendiri.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang tertulis berasal dari sumbernya dan diperoleh dari dokumen- dokumen, arsip, laporan-laporan, peraturan-peraturan, referensi dari koran maupun internet yang akan melengkapi dan memperkaya sumber data primer.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan dan cara untuk memperoleh atau mengambil data atau informan. Sehingga dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dalam menjawab permasalah yang ada. Maka tehnik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

   Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaoitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemuka pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami. Observasipun dilakukan di Dinas bidang UMKM serta UMKM di KotaMadiun.

2. *Interview* (wawancara)

   Wawancara merupakan metode dalam memperoleh data dengan melakukan serangkaian Tanya jawab terhadap pihak yang terkait

dalam hal ini adalah kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah Kota Surabaya. Wawancara yaitu, "Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan sumber-sumber data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas" (Arikunto,2009:202). Daftar pertanyaan dibuat secara terstruktur agar dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan peneliti.

3. Dokumentasi

   Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2006:73). Dalam hal ini peneliti akan mencari data-data tertulis dari Dinas terkait yang berkenaan dengan fokus yang akan diteliti yakni Dinas bidang UMKM Kota Madiun dan UMKM yang ada di Kota Madiun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri yaitu dalam memperoleh data, peneliti sebagai instrument yang menyaksikan, mengamati serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berlangsung.
2. Pedoman wawancara (*interview guide***)** berupa daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan atau mempermudah dalam melaksanakan wawancara dengan informan sehingga pertanyaan tidak keluar dari permasalahan yang diteliti.
3. Catatan lapangan (*field notes*) catatn penelitian dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian dengan ditunjang pengambilan foto.
4. Alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera, yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan roses dimana data yang telah ada disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan diinterpretasikan. Sugiono (2011:244) menjelaskan bahwa:

> "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menuyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Analisis data yang digunakan peneliti ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiono (2011: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungsecara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusing drawing/verivication* ditampilkan pada gambar 2 di bawah ini:

Gambar 1 Komponen dalan Analisis Data (*Interactive Model*)

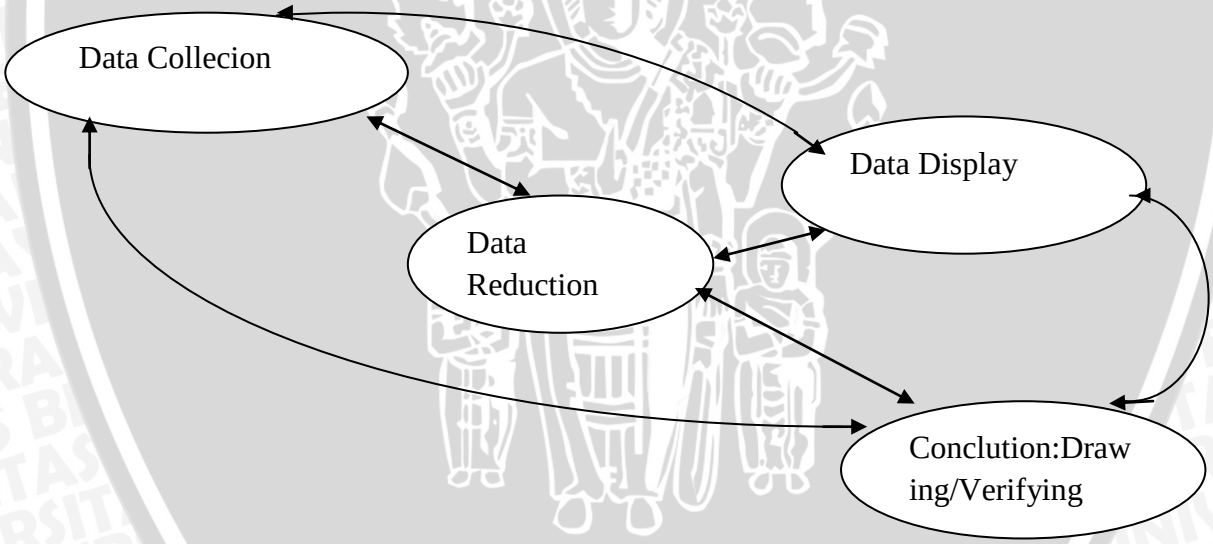

Sumber : Milles & Huberman dalam Sugiono (2011:247)

Dari komponen dalam analisis data (*interavtive model*) yang dipaparkan pada gambar 2 di atas berikut adlah penjelasannya:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting (Sugiono, 2011: 247). Tujuan dari reduksi data adalah mentransformasikan data mentah yang telah diperoleh di lapangan menjadi lebih sederhana dengan mengorganisasikan dan menggolongkan sesuai fokus penelitian. Jadi data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait tema Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri di Kota Madiun, serta indikator utama penentunya direduksi dan digolongkan sesuai fokus yang telah ditentukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Penyajian data merupakan penyusunan data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis yang memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiono 2011: 249). Miles and Huberman dalam Sugiono (2011: 249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitati adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor

Perdagangan dan Industri di Kota Madiun, serta indikator utama penentunya, data yang telah direduksi dan digolongkan sesuai fokus peneltian yang ditentukan dapat disajikan melalui uraian singkat maupun bagan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

   Proses akhir dari analisi data dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Data yang yang telah disajikan tersebut dibahas dan dikorelasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan. Sugiono (2011:253) mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, dan teori. Dalam penarikan kesimpulan penelitian ini, data yang telah disajikan terkait Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri, serta indikator utama penentunya dibahas dan dikorelasikan dengan teori, dan kemudian disimpulkan temuan apa yang diperoleh dari penelitian tersebut sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Madiun

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Madiun yang dikenal dengan sebutan Kota GADIS, Kota Perdagangan dan Kota Industri secara legal formal didirikan pada tangal 20 Juni 1918. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Madiun. Kota Madiun dahulu merupakan pusat dari Karesidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara budaya Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan (Mataraman atau Solo-Yogya), karena Madiun lama berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Meskipun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, kehidupan masyarakatnya tidak semata mata seperti di kota-kota besar pada umumnya. Ukuran kotanya pun tidak cukup luas untuk Kota Madiun sendiri, level yang dicapai Kota Madiun adalah sebuah kota yang masih tergolong klasifikasi antara kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum bisa dikatakan sebagai kota besar.

Kota Madiun juga merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km² sebelah Barat Kota Surabaya, atau 111 km² sebelah Timur Kota Surakarta. Di Kota ini terdapat pusat industri kereta api (INKA), selain itu Madiun dikenal memiliki Lapangan Terbang

Iswahyudi, yakni salah satu pangkalan utama AURI, meski sebenarnya terletak di Kabupaten Magetan. Selain memiliki julukan Kota Gadis, Kota Madiun sering juga disebut Kota Brem, Kota Pelajar, Kota Sepur, Kota Pecel, Kota Budaya, Kota Sastra, dan Kota Industri.

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT atau sepanjang 6 km bentang arah timur dan antara 7° LS - 8° LS atau sepanjang 7,5 km bentang arah utara selatan. Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Madiun Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kacamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu dipaparkan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
I	Manguharjo	10,04
1.	Manguharjo	1,40
2.	Sogaten	1,12
3.	Patihan	0,84
4.	Ngegong	1,34
5.	Winongo	2,00
6.	Madiun Lor	0,73
7.	Pagongangan	0,61
8.	Nambangan Lor	0,98
9	Nambangan Kidul	1,02
II	Taman	12,46
1.	Mojorejo	1,54
2.	Pandean	0,32
3.	Banjarejo	1,92
4.	Kuncen	1,83
5.	Manisrejo	0,92
6.	Kejuron	1,59
7.	Josenan	1,06
8.	Demangan	1,26
9.	Taman	2,02
III	Kartoharjo	10,73
1.	Kartoharjo	0,94
2.	Oro-Oro Ombo	0,81
3.	Klegen	0,84
4.	Kanigoro	1,62
5.	Pilangbango	1,21
6.	Rejomulyo	2,03
7.	Sukosari	0,55
8.	Tawangrejo	1,77
9.	Kelun	0,96
Jumlah		33,23

Sumber Data: Kecamatan Dalam Angka 2012

Dari tabel 2 di atas, dijelaskan bahwa Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km², yang masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan.

2. Pemerintahan Daerah

Kota Madiun dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Secara administratif wilayah Kota Madiun terbagi menjadi dalam 3 kecamatan, yang masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga di Kota Madiun terdapat 27 kelurahan. Secara rinci jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun Tahun 2012

No.	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah	
		RW	RT
.I	Manguharjo	88	318
1.	Manguharjo	8	35
2.	Sogaten	9	29
3.	Patihan	6	22
4.	Ngegong	5	16
5.	Winongo	11	34
6.	Madiun Lor	9	41
7.	Pagongangan	9	26
8.	Nambangan Lor	16	69
9.	Nambangan Kidul	15	46
II	Taman	105	382
1.	Mojorejo	14	63
2.	Pandean	18	58
3.	Banjarejo	8	30
4.	Kuncen	4	9
5.	Manisrejo	12	59
6.	Kejuron	15	50
7.	Josenan	9	28
8.	Demangan	10	34
9.	Taman	15	51
III	Kartoharjo	74	309
1.	Kartoharjo	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	9	43
3.	Klegen	10	48
4.	Kanigoro	12	52
5.	Pilangbango	5	22

6.	Rejomulyo	11	38
7.	Sukosari	6	18
8.	Tawangrejo	6	24
9.	Kelun	6	26
Jumlah		267	1.009

Sumber Data: Kecamatan Dalam Angka 2012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengemdalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Menurut data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Madiun, maka visi dan misi Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Visi Pemerintah Kota Madiun:

Visi pemerintah Kota Madiun untuk tahun 2009-2014 adalah "Bekerja untuk Kemajuan Kota Madiun Sejahtera". Substansi yang terkandung dalam visi tesebut hakekatnya adalah mengarah pada terwujudnya Kota Madiun yang "Maju dan Sejahtera". Secara substansial visi tersebut merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Sehingga jika dikaitkan dengan RPJP Kota Madiun dimaksud dari visi tersebut mengarah kepada "Terwujudnya Masyarakat yang Maju dan Sejahtera melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP".

2. Misi Pemerintah Kota Madiun

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada visi kota yang telah ditetapkan, misi Kota Madiun periode 2009-2014 sebagai berikut:

a. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (pastisipatoris).
b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan (*Good and Clean Governance*) melalui penegakan pakta integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
c. Mewujudkan pelayanan publik.
d. Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis.

Guna mengoperasionalkan misi-misi tersebut, dibutukan arah misi atau orientasi pembangunan tahun 2009-2014 sebagai berikut:

a. Mewujudkan pembagunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance*.
c. Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat.
d. Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktur dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan.

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran

tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan misi atau orientasi pembangunan "Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah, melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat". Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan yang mengedepankan keunggulan atau potensi yang ada didaearah dalam hal ini Kota Madiun serta keterkaitannya dengan daerah lain (*interregional linkage*), sehingga semakin meningkatnya kegiatan ekonomi yang tercermin dari kegiatan produksi oleh masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah:
    1. Meningkatkan kapasitsas pasar, UMKM, koperasi, dan perdagangan regional;
    2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan;
    3. Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi.
b. Misi "Mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good dan clean governance*". Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran

serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penegakan *rule of law* secara adil dan mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Menciptakan transparansi di dalam pengelolaan kebutuhan informasi mutlak dilakukan, untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah harus mampu membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*. Mengacu pada hal tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner, dan profesional;
2. Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner, dan transparan;
3. Mengembangkan kerjasama.

c. Misi "Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat". Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, pemerintah Kota Madiun juga mengemban amanah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada urusan pendidikan, kesehatan infrastruktur, untuk itu di tetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
3. Mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis "*eco city*".

d. Tujuan yang ditetapkan untuk pencapaian misi "Mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang kontruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan" ini adalah:
   1. Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
   2. Mengembangkan pengarustamaan gender;
   3. Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya;
   4. Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian, dan kesalehan sosial.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan tujuan "Meningkatkan kapasitas pasar, UMKM dan perdagangan regional", maka ditetapkan sasaran:
   1. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada PDRB;
   2. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal.

b. Berdasarkan tujuan "Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan" sasarannya sebagai berikut:
   1. Stabilnya konstribusi sektor pertanian;
   2. Meningkatnya konstribusi sektor industri;
   3. Stabilnya konstribusi sektor jasa;
   4. Meningkatnya konstribusi sektor pengangkutan dan komunikasi;
   5. Meningkatnya konstribusi sektor keuangan.
c. Berdasarkan tujuan "Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pembangunan ekonomi" ditetapkan sasaran sebagai berikut:
   1. Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan;
   2. Meningkatnya kesempatan kerja dan usaha;
   3. Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok atau koperasi wanita;
   4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui UMKM.
d. Berdasarkan tujuan "Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner, dan profesional" maka sasaran yang ditetapkan adalah:
   1. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
   2. Meningkatnya kualitas hasil perencanaan.
e. Sesuai dengan tujuan "Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner, dan transparan" maka sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kinerja

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan dasil-hasil pembangunan.

f. Berdasarkan tujuan "Mengembangkan kerjasama" maka sasaran yang ditetapkan adalah: meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

g. Tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata" memiliki sasaran:

   1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
   2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
   3. Penguatan dan tata kelola serta pencitraan publik.

h. Sasaran yang ditetapkan dari tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau" adalah sebagai berikut:

   1. Meningkatnya angka harapan hidup (AHH);
   2. Meningkatnya kualitas penanganan KIBBLA (Kesehatan ibu, Balita dan Bayi baru lahir);
   3. Meningkatnya aksesibilitas pelayananan kesehatan;
   4. Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyakit.

i. Sasaran yang ditetapkan dari tujuan "Mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis "*eco city*" adalah:

   1. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan drainase, pengendalian, banjir, sanitasi dan air bersih;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi.

j. Penetapan sasaran dari tujuan "Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan" adalah: meningkatnya peran aktif organisasi masyarakat (ormas) dalam pembangunan.

k. Tujuan "Mengembangkan pengarustamaan gender" memiliki sasaran sebagai berikut:
   1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
   2. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

l. Berdasarkan tujuan "Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya" memiliki sasaran sebagai berikut:
   1. Meningkatnya kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional;
   2. Meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata.

m. Sesuai dengan tujuan "Mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial" memiliki sasaran:
   1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
   2. Meningkatnya perlindungan terhadap PMKS.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kota Madiun merupakan kota transit bagi turis domestik maupun mancanegara, walaupun Kota Madiun tidak mempunyai obyek pariwisata. Sebagai kota transit Kota Madiun mempunyai berbagai sarana dan prasarana akomodasi yang memadai antara lain hotel berbintang, penginapan dan biro perjalanan serta sarana umum lainnya. Kota Madiun mempunyai kekhasan dalam makanan yaitu berupa nasi pecel, lempeng, madumongso yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan perananan Kota Madiun sebagai sub sentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di bagian Barat dan dengan memperhatikan fungsi dan karakteristik yang dimiliki Kota Madiun mempunyai arah pembangunan Kota Madiun yang dapat disingkat sebagai Kota GADIS, yang merupakan kepanjangan dari Madiun sebagai Kota Perdagangan, Kota Pendidikan, dan Kota Industri.

Kota Madiun merupakan kota yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil, memudahkan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, dan letak geografisnya sangat strategis karena terletak ada simpul jaringan jalan raya regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah Jawa Tengah. Disamping itu Kota Madiun juga dilewati jaringan jalan kereta api lintas utama Pulau Jawa bagian selatan, yang menghubungkan Surabaya-Jakarta, dan Surabaya-Bandung, serta kondisi topografi yang landai atau datar

mempermudah dalam pembangunan fisik Kota Madiun menjadi potensi untuk pembangunan daerah Kota Madiun.

Potensi ekonomi Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiaanya mengandalkan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran. Potensi sektor Industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi dan konstribusinya paling besar tehadap perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata selalu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pendapatan perkapita juga terus mengalami kenaikan, serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2013	5.689.253,62	2.226.725,63
2012	4.996.338,32	2.114.843,99
2011	4.380.550,11	1.977.780,63

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai PDRB Kota Madiun Tahun 2013 naik sebesar 13,87%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi di tahun 2013 dan naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi diantaranya sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, perdagangan, industri dan jasa perusahaan serta sektor bangunan.

Tabel 5 Perkembangan PDRB Kota Madiun Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No.	SEKTOR	Nilai PDRB ADHB (Rp)		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	87.731,52	97.873,85	104.247,10
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	804,80	876,20	996,83
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	785.613,66	886.484,40	899.737,05
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	53.260,25	60.267,82	66.478,95
5.	BANGUNAN	208.065,65	259.725,00	319.360,09
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	1.919.099,34	2.162.034,86	2.554.958,58
7.	ANGKUTAN	333.629,62	389.366,76	445.813,6

	DAN KOMUNIKASI			3
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	351.653,27	411.546,14	483.518,20
9.	JASA-JASA	640.691,99	728.163,27	814.134,19
PDRB		4.380.550,11	4.996.338,32	5.689.253,62

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Sedangkan perkembangan PDRB Kota Madiun menurut harga kosntan dijelaskan pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan (Juta Rupiah)

No.	SEKTOR	Nilai PDRB ADHB (Rp)		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	40.606,72	42.418,39	42.131,88
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	321,61	338,77	366,45
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	355.56,75	366.881,80	366.893,01
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	21.578,40	22.863,38	24.300,78
5.	BANGUNAN	82.570,47	86.795,25	95.402,91
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	854.383,14	915.000,32	1.005.063,74
7.	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	165.329,30	186.119,94	202.558,86
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	154.106,17	168.103,19	183.908,88
9.	JASA-JASA	303.828,07	326.322,96	346.099,12
PDRB		1.977.780,63	2.144.843,99	2.226.725,63

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Berdaskan tabel 5 dan 6 dengan melihat perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2011 sebesar 4,380 triliun rupiah terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 5,689 triliun rupiah atau meningkat sebesar 29,88%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012) nilai PDRB ADHB nai sebesar 13,87%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi ditahun 2013 dan naiknya nilai produksi dibeberapa sektor ekonomi diantaranya sektor angkutan dan komunikasi,sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011 juga terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2011 sebesar 1,977 triliun rupiah terus meningkat menjadi 2,266 triliun rupiah tahun 2012 atau meningkat sebesar 14,61%. Berdasarkan tabel perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat dilihat besarnya tingkat pertubuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,18% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,93%. Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ditunjukkan oleh tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	5,54	4,46	0,68
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	6,10	5,33	8,17
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	6,32	3,33	0,00
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2,44	5,95	6,29
5.	BANGUNAN	3,64	5,12	9,92
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	5,14	7,09	9,84
7.	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	10,18	12,58	8,83
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	5,73	9,08	9,40
9.	JASA-JASA	7,39	7,40	6,06
PDRB		6,06	6,93	7,18

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Berdasarkan tabel 7 dengan sembilan sektor pendukung ekonomi semua sektor tumbuh positif kecuali pada sektor pertanian dan industri pengolahan pada tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yang disebabkan antara lain oleh banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi perumahan dan bangunan untuk usaha serta anomali cuaca sepanjang tahun 2013 yang kurang mendukung terhadap pertumbuhan pada sektor-sektor tesebut.

Pada tahun 2013 pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor angkutan dan komunikasi, kemudian berturut-turut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasaa-jasa, sektor pertambangan dan penggalian, sektor

listrik, gas dan air bersih. Pada tahun 2011-2013 pada peranan ekonomi sektoral atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Nilai PDRB ADHB (%)		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	2,00	1,96	1,83
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,02	0,02	0,02
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	17,93	17,74	15,81
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,22	1,21	1,17
5.	BANGUNAN	4,75	5,20	5,61
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	43,81	43,27	44,91
7.	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	7,62	7,79	7,84
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	8,03	8,24	8,50
9.	JASA-JASA	14,63	14,57	14,31
PDRB		100	100	100

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Berdasarkan tabel 8 diatas dengan melihat besarnya peranan atau konstribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2013 adalah banyak ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa yang secara bersama-sama memberikan konstribusi terhadap PDRB sebesar 75%. Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau konstribusi sektor-sektor terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perekonomian Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Nilai PDRB ADHK (%)		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	2,05	2,01	1,86
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,02	0,02	0,02
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	17,95	17,35	16,19
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,09	1,08	1,07
5.	BANGUNAN	4,17	4,10	4,21
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	43,20	43,27	44,34
7.	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	8,36	8,80	8,94
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	7,79	7,95	8,11
9.	JASA-JASA	15,36	15,43	15,27
PDRB		100	100	100

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Dari tabel 9 diatas, dapat disimpulkan bahwa Atas Dasar Harga Konstan konstribusi sektor yang paling dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2013 yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi 76%. Berdasarkan indeks implisit yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen yaitu perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga dasar konstan maka tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2013 yang mencapai 6,24% lebih kecil dibanding tahun 2012 yang mencapai 6,67%. Tingkat inflasi di Kota

Madiun pada tahun 2011-2013 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10 Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun

Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Inflasi Berdasarkan PDRB		
		2011	2012	2013
1.	PERTANIAN	6,23	6,60	7,24
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,33	3,36	5,17
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,17	9,20	1,49
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	6,44	6,80	3,80
5.	BANGUNAN	1,75	18,75	11,87
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,14	5,20	7,58
7.	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,87	3,67	5,20
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	6,36	7,29	7,39
9.	JASA-JASA	4,00	5,82	5,42
PDRB		5,26	6,67	6,24

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

4. Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan meningkatnya pasar regional. Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja sasaran meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah relokasi/lokasi penataan pedaganga kaki lima (PKL) dan cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal.

1. Kontribusi Sekor Perdagangan

   Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun. Hal ini disebabkan banyaknya pusat perdagangan seperti mall, plaza, hypermart, carefour, dan tempat-tempat pembelanjaan lainnya yang ada di Kota Madiun. Tahun 2011 peranan sektor perdagangan mengalami kenaikan 1,52% dari tahun sebelumnya yang mencapai 37,52% menjadi 39,04%.

2. Omset Pasar Regional Meningkat

   Pada tahun 2012 untuk omset pasar regional di Kota Madiun terjadi peningkatan sebesar 24,87% dari Rp 96.891.660.000,00 omset pasar regional pada tahun 2011 menjadi Rp 120.985.860.000,00. Omset pasar regional meningkat dikarenakan pada tahun 2011 yang dijadikan survei pendataan hanya 8 pasar sedangkan untuk tahun 2012 sudah 14 pasar yang dikelola pemerintah Kota Madiun dan salah satu pengaruh yang paling besar karena sudah dapat dioperasionalkannya Pasar Besar Kota Madiun.

3. Pengelolaan Pasar

Fasilitas perdaganga yang menggerakkan perekonomian nasional dan lokal di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar tradisional sebanyak 14 unit dan pasar modern 10 unit. Keberadaan pasar-pasar tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi kota, regional maupun PAD Kota Madiun. Pasca kebakaran Pasar Besar Madiun pada tahun 2008, telah diambil langkah-langkah cepat dan strategis oleh pemerintah Kota Madiun antara lain mendata kembali pedagangan yang terkena musibah kebakaran.

Pada tahun 2010 pembangunan Pasar Besar Kota Madiun dimulai dan selesai pada akhir Desember 2011 serta pelaksanaan Program Relokasi dan Penataan Pedagang telah disiapkan oleh Dinas Pasar Kota Madiun mulai januari 2012. Pentahapan penataan dan penempatan pedagang ini mutlak dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi antara pedagangan maupun dengan Dinas Pasar sebagai akibat dari proses penataan atau relokasi. Penempatan kembali pedagangan Pasar Besar Kota Madiun secara bertahap memberi dampak pada peningkatan kembali roda perekonomian Kota Madiun.

Beroperasinya kembali Pasar Besar Kota Madiun secara langsung memberi dampak pada peningkatan PAD khususnya Retribusi Pelayanan Pasar dimana tingkat capaian PAD dan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 147% dari target yang telah ditetapkan. Adapun sumbangan terbesar PAD tersebut berasal dari pendapatan sewa tempat dasaran Pasar Besar Kota Madiun.

5. Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, bebasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan Industri di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Jumlah industri di Kota Madiun pada tahun 2012 adalah 259 unit, terdapat peningkatan 14 unit industri dari tahun 2011 yang mencapai 245 unit. Sehingga diperoleh angka pertumbuhan industri tahun 2012 adalah 5,71%.

Kota Madiun yang terkenal sebagi Kota Gadis, Perdagangan dan Industri. Sebutan sebagai Kota Industri, sektor ini mampu memberikan kontribusi atau peranan terbesar kedua setelah sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Madiun. Pada tahun 2011, peranan sektor industri pengolahan mengalami penurunan terbesar selama tiga tahun terakhir menjadi 15,81% atau turun sebesar 1,93% dari tahun sebelumnya.

Sektor industri pengolahan sendiri terdiri dari sembilan sub sektor. Sub sektor yang memberikan peranan terbesar adalah sub sektor angkutan, mesin dan peralatannya. Hal ini dikarenakan adanya Industri Kereta Api (INKA) di Kota Madiun yang membuat kereta api tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga diekspor ke luar negeri. Sub sektor kedua dengan peranan terbesar kedua pada sektor industri pegolahan adalah sub sektor makanan, minuman dan tembakau. Salah satu

penyumbang terbesar pada sub sektor ini adalah pabrik gula yang dikelola oleh PTP Nusantara XI.

Secara umum, besarnya peranan sektor industri sangat bergantung pada kedua sub sektor di atas. Bila peranan kedua sub sektor naik, maka peranan sektor industri juga naik. Sebaliknya, bila peranan kedua sub sektor tersebut turun maka peranan sektor industri juga akan turun. Tahun 2011 besarnya peranan sub sektor angkutan, mesin dan peralatannya dam sub sektor makanan, minuman dan tembakau menurun masing-masing 12,42% dan 2,51%. Hal ini berdampak pada menurunnya peranan sektor industri.

B. Gambaran Umum UMKM di Kota Madiun

Kota Madiun merupakan Satuan Wilayah Pengembangan Ekonomi Jawa Timur bagian barat. Keberadaan UMKM yang mayoritas milik masyarakat kecil mendominasi jumlah usaha kegiatan ekonomi regional. Pemerintah Kota Madiun yang ingin mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan UMKM di Kota Madiun bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pasar, UMKM, perdagangan regional, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan penanganan pengangguran serta kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi dengan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dan masyarakat melalui

UMKM. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsungannya

   Meningkatnya SDM masyarakat Kota Madiun, dan adanya pelatihan-pelatihan yang telah diadakan Pemerintah Daerah Kota Madiun, minat masyarakat untuk berwirausaha semakin meningkat dilihat dari naiknya angka UMKM tiap tahun. Data UMKM seluruhnya adalah 22.998 dan yang sudah mempunyai izin sejumlah 1.108 UMKM. Sedangkan yang informal belum punya izin usaha tetapi keberlangsungan usahanya masih ada sejumlah 21.980 UMKM.

2. Meningkatnya sentra UMKM yang terfasilitasi

   Banyaknya pengusaha-pengusaha di Kota Madiun dalam pembuatan produk hasil usahanya sama, maka dibentuk sentra-sentra usaha untuk produk yang sama, di Kota Madiun terdapat 5 (lima) sentra usaha antara lain sentra UMKM tahu tempe, sentra sambal pecel, sentra industri kerajinan tahu, sentra batik dan sentra bordir.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

   Jumlah UMKM yang ada di Kota Madiun sampai dengan tahun 2013 sebanyak 22.998 UMKM termasuk didalamnya dengan kategori usaha mikro sejumlah 21.981 atau 95,58% dan usaha kecil sejumlah 531 atau 2,3% sedangkan sisanya 486 atau 2,11% merupakan usaha menengah.

Perkembangan capaian kinerja sasaran-sasaran pada penyelenggaraan urusan UMKM di Kota Madiun sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran pada Penyelenggaraan Urusan UMKM Kota Madiun Tahun 2012-2013

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi	
			RPJMD s/d 2014	RKT 2012	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsunga-nnya	18.500 unit	27.348 unit	22.790 unit	22.998 unit
		Meningkatnya sentra UMKM yang terfasilitasi	5 unit	5 unit	4 unit	5 unit
		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	100%	92%	92%	97,88%
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui UMKM	Terserapnya fasilitasi permodalan usaha yang disediakan pemerintah maupun BUMN meningkat.	17 M	14 M	48,242 M	48,571 M

Sumber Data: Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun

Berdasarkan tabel 11 tersebut dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan pada sektor UMKM tahun 2012-2013, dimana hal ini pemerintah Kota Madiun membuktikan bahwa UMKM di Kota Madiun berkembang ke arah yang jauh lebih baik dan mampu mengembangkan

perekonomian lokal dalam menghadapi persaingan disektor perdagangan dan industri. Hal ini menjadikan alasan pemerintah daerah harus jauh lebih memperhatikan lagi dalam pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kota Madiun. Pemberdayaan UMKM ini merupakan salah satu *instrument* untuk menaikkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dan situasi krisis moneter. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga konstribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional maupun daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Perencanaan strategi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing daerah khususnya disektor perdagangan dan industri, bisa menjadi langkah yang logis daripada berambisi manyaingi suatu produk industri yang menjadi unggulan dari potensi daerah lain. Sebab dengan cara memberdayakan UMKM guna meningkatkan daya saing disektor perdagangan dan industri ini, suatu daerah dapat dimungkinkan masih mampu bersaing dengan daerah lain di "kandang" sendiri atau daerah tersebut, terlebih lagi jika mampu menguasai pasar lokal daerah lain. Selain itu suatu daerah juga dapat menjaga roda perekonomiannya terutama industri agar tetap berjalan *continue*. Untuk menghadapi permasalahan globalisasi perdagangan,

dengan menggunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah khususnya dibidang industri, diharapkan mampu memberikan konstribusi dan bisa menjadi sektor yang diandalkan oleh daerah, khususnya di wilayah Kota Madiun.

Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan pemerintah daerah di Kota Madiun ini menghasilkan keberagaman jenis usaha UMKM yang kualitas dan mutu produknya pun tidak kalah dengan produk-produk UMKM daerah lain, yakni seperti brem, sambel pecel, madu mongso, batik, manik-manik, clay panorama, dan masih banyak lainnya produk-produk UMKM unggulan yang dihasilkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun itu sendiri. Produk-produk unggulan yang dihasilkan melalui pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu bersaing, khususnya disektor perdagangan dan industri yang ada di wilayah Kota Madiun.

C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri

Pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk meningkatkan persaingan disektor ekonomi yaitu perdagangan dan industri dengan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memecahkan permasalahan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah di Kota Madiun berupaya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM

tersebut agar masyarakat Kota Madiun mampu bersaing dengan daerah lain khususnya dibidang perdagangan dan industri. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memberikan strategi dalam pemberdayaan UMKM kepada masyarakat Kota Madiun, guna mencapai kinerja yang baik di mata masyarakat atau pencapaian *good governance* dan hal tersebut diterapkan untuk mencapai sistem pelayanan lebih baik lagi yang ditunjukkan kepada masyarakat Kota Madiun, untuk memenuhi harapan peningkatan pelayanan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan UMKM dalam hal ini seperti:

a. Peningkatan Permodalan

Suatu usaha dimulai karena adanya suatu peluang bisnis dan ketertarikan pada keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Mewujudkan peluang menjadi kenyataan adalah proses yang memerlukan waktu relatif cukup lama. Waktu yang diperlukan untuk mengatur prasyarat, seperti menjajaki layak tidaknya usaha tersebut, pencarian sumber modal, ketersediaan bahan baku, sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja yang tersedia serta ketersediaan pasar untuk menyalurkan barang dan jasa. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. UMKM harus terus ditingkatkan dan aktif

agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UMKM yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah dan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah.

Selain pemerintah dan UMKM, peran dari sektor perbankan juga sangat penting terkait segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberi pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Kemudian terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita sampingkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak SOEDARJANTO, SE selaku Kasi Permodalan Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun sebagai berikut:

> "...terdapat beberapa hal yang menyebabkan UMKM di Kota Madiun mengalami gulung tikar diantaranya yaitu salah pengelolaan dari aspek managerial, dan aspek produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM, kemudian ketersediaan bahan baku bagi UMKM tertentu yang kebetulan bahan bakunya sulit atau tidak terdapat di Kota Madiun, dan yang terakhir adalah dari segi permodalan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Permodalan merupakan sebuah faktor yang penting bagi kelangsungan usaha dan perkembangan usaha dari para pelaku UMKM, seperti yang kita ketahui tanpa adanya sebuah modal maka UMKM tidak akan bisa berdiri sendiri serta tanpa adanya tambahan modal maka UMKM juga akan sulit untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar kedepannya. Sehingga salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Madiun terhadap pengembangan UMKM yang ada di Kota Madiun yaitu meningkatkan

akses permodalan kepada para pelaku UMKM....” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, dengan kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun modal maka para pelaku UMKM akan melakukan perbaikan-perbaikan agar produknya bisa bertahan atau laku dipasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak SODARJANTO, SE selaku Kasi Permodalan Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun sebagai berikut:

“....dengan kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun modal maka para pelaku UMKM akan melakukan perbaikan-perbaikan agar produknya bisa bertahan atau laku dipasaran. Salah satu strategi kami untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM yaitu dengan menjembatani pemilik modal dengan pelaku UMKM, agar pelaku UMKM membuat proposal yang ditujukan kepada pemilik modal serta melengkapi persyaratan untuk menerima pinjaman modal yang selanjutnya pemerintah daerah dan pemilik modal melakukan survei kepada usaha yang dikembangkan apakah layak atau tidak untuk diberikan pinjaman modal, hal tersebut kami lakukan agar memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh akses permodalan dari perbankan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses permodalan yaitu sudah benar-benar punya usaha minimal yang berjalan 2 tahun dan menunjukkan peningkatan selama mengembangkan usahanya, memiliki tenaga kerja, memiliki jaminan berupa BPKB atau sertifikat dan berdomisili KTP Madiun. Tanpa adanya persyaratan tersebut maka mereka akan kesulitan dalam memperoleh akses permodalan baik perbankan maupun lembaga lainnya ....” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Bapak SOEDARJANTO, SE selaku Kasi Permodalan Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR di Kota Madiun mengungkapkan:

“...dengan berbagai spesifikasinya, terutama modalnya yang kecil sampai tidak terlalu besar, dapat merubah produk dalam waktu yang tidak terlalu lama dan manajemennya yang relatif sederhana serta jumlahnya yang banyak dan tersebar di wilayah nusantara,

> menyebabkan UMKM memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi. Berbagai permasalahan mikro yang terdapat pada kebanyakan UMKM, dapat menghambat UMKM untuk dapat berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi tersebut memberikan isyarat bahwa UMKM sepantasnya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya..." (Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas diketahui bahwa permodalan merupakan hal yang penting bagi terciptanya sebuah UMKM serta berkembangnya sebuah UMKM dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Tanpa adanya sebuah modal dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami gulung tikar terhadap usahanya dan kurang mampu bersaing dengan usaha besar lainnya. Keterbatasan modal juga membuat para pelaku UMKM sulit untuk berkembang dan mempertahankan kelangsungan usahanya serta tidak akan mampu bersaing disektor ekonomi yaitu sektor perdagangan dan industri. Keterbatasan modal berakibat terhadap kualitas produk bagi para pelaku UMKM menjadi kurang baik serta tidak bisa melakukan pengembangan produk untuk kelangsungan usaha dari para pelaku UMKM. Pemerintah daerah di Kota Madiun berusaha meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku UMKM dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan dan non perbankan yaitu PT.INKA dan PERURI agar berkenan memberikan modal bagi para pelaku UMKM. Selain itu pemerintah daerah di Kota Madiun juga mempermudah pengurusan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM, karena persyaratan tersebut merupakan salah

satu syarat penting bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh modal dari pihak perbankan maupun non perbankan.

b. Pengembangan Pasar UMKM

Sebuah perusahaan pada umumnya menginginkan apa yang diproduksi dapat dipasarkan dengan lancar dan menguntungkan. Berawal dari hal tersebut perusahaan menginginkan agar pelanggan yang sudah diciptakan dapat dipertahankan selamanya. Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri pelanggan, seperti selera maupun beberapa aspek psikologis sosial dan kultur pelanggan. Dalam jangka panjang loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi perencanaan strategis, selain itu juga dijadikan dasar pengembangan keunggulan yang berkelanjutan, yaitu berbagai keunggulan yang dapat direalisasikan melalui upaya-upaya pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah bisnis, apabila perusahaan hanya membuat produk yang berkualitas saja namun kurang mempunyai strategi pemasaran yang baik maka produk tersebut tidak akan dikenal oleh pasar dan produk tersebut tidak akan sampai kepada konsumen yang sebenarnya membutuhkan produk tersebut. Sehingga pemasaran terhadap sebuah produk merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, dimana pemerintah daerah di Kota Madiun memfasilitasi hasil produk UMKM tersebut untuk dipasarkan, sehingga dikenal oleh pasar maupun konsumen.

Ibu SAPTO SUSILOWATI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR di Kota Madiun mengungkapkan:

> "....pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun dalam memasarkan produknya melalui kegiatan pemberian fasilitas produk UMKM gedung SMESCO, gedung pamer dan gedung souvenir, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka hari jadi Expo Nasional, guna untuk memasarkan produk mereka, agar diketahui masyarakat luas. Selain itu kami juga membantu para pelaku UMKM dalam pemasaran melalui *Online Website* yaitu www.disperindagkoppar.com, leaflet, brosur, mengadakan kerjasama atau tim bisnis dengan daerah lain. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun)

Lebih lanjut Ibu SAPTO SUSILOWATI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR di Kota Madiun mengungkapkan:

> "....strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun dalam pemberdayaan UMKM agar produknya berkualitas dan mampu bersaing dipasaran khususnya bersaing disektor perdagangan dan perindustrian, kami juga memberikan pelatihan mengenai pemasaran sebuah produk yang bagus agar produk tersebut dapat dipasarkan dan sampai kepada tangan konsumen yang membutuhkan. Suatu produk agar laku dipasaran meliputi tahapan dasar yang dapat dilakukan untuk merumuskan secara sistematis dan kreatif, yaitu sebagai berikut ini:
>
> a. Perhatikan siapa pesaing dekat anda dan apa yang mereka berikan. Karena pesaing merupakan sumber inspirasi dan cermin yang bagus untuk berkaca, agar anda pun dapat mengevaluasi produk yang anda pasarkan.
> b. Pergunakan atribut-atribut dengan ciri khas, yaitu sebagai alat untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan yang menyenangkan bagi pelanggan anda.
> c. Pahami betul siapa pelanggan anda dan selera, gaya, keinginan, kebutuhan dan peubahannya.
> d. Berikan pelatihan kepada setiap petugas garda depan (*frontliner*) dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengenalkan keunggulan produk yang anda miliki.
> e. Lakukan evaluasi sesering mungkin dan mintalah pendapat kepada pelanggan anda untuk memberikan masukan, saran maupun kritik mengenai produk dan bisnis anda, apa saja yang kurang dan apa yang perlu untuk dilakukannya upaya peningkatan...." (Hasil

wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Ibu SAPTO SUSILOWATI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun sebagai berikut:

> "....Kondisi perekonomian kini telah cenderung semakin mengglobal. Hubungan di bidang ekonomi antar negara di dunia mulai tidak mengenal batas-batas wilayah secara geografis. Sehingga globalisasi telah menyebabkan hilangnya batas ekonomi diantara negara-negara di dunia. Kondisi ini membuat dunia bisnis Indonesia semakin menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemberdayaan UMKM diharapkan mampu dalam menghadapi pasar regional dan global yang harus didasari pada upaya yang keras dan terus menerus. Diusahakan UMKM sekurang-kurangnya mempunyai keunggulan kompetitif, bahkan sangat diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif agar mampu bersaing disektor perekonomian khususnya perdagangan dan industri..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun)

Lebih lanjut Ibu SAPTO SUSILOWATI, SE selaku Kasi Fasilitasi Bidang UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun mengungkapkan:

> "....Produk UMKM merupakan hal yang cukup penting dalam kebutuhan pasar, banyak yang berkaitan dengan masalah kebutuhan sekunder, walaupun ada sebagian kecil kebutuhan primer, namun dengan keberagaman jenis atau macam produk yang relatif terbatas sasarannya. Dalam hubungan itu desain produk, kerap kali dapat disubstitusi dengan desain produk serupa tetapi memakai bahan baku lain yang sejenis atau berbahan baku *non local*. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, desain maupun kualitas produk UMKM serta ketersediaannya menjadi isu startegis yang harus dikelola secara optimal. Posisi desain produk kerajinan misalnya memberi nilai atau arti tertentu. Apalagi kalau produk itu menjadi produk budaya lokal, dimana cirinya menggambarkan identitas wilayah atau kelompok masyarakat tertentu..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun)

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun berusaha

menciptakan sebuah produk varian atau inovasi baru agar masyarakat atau konsumen tidak jenuh dengan produk yang dijual dan memberikan fasilitasi dalam penyelenggaran pemasaran atau pameran hasil produk-produk UMKM yang ada diwilayah Kota Madiun. Pemerintah daerah Kota Madiun dalam memasarkan produknya yaitu melalui pemberian fasilitas produk UMKM gedung SMESCO, gedung pamer dan gedung souvenir, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka hari jadi Expo Nasional, selain itu melalui pemasaran *online website* www.disperindagkoppar.com, leaflet, brosur, mengadakan kontak atau temu bisnis dengan daerah lain. Selain membantu dalam hal pemasaran pemerintah daerah di Kota Madiun juga memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar membuat sebuah produk yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar sehingga produk dari pelaku UMKM tersebut mudah untuk dipasarkan dan diterima oleh konsumen yang membutuhkan.

c. Peningkatan Kualitas SDM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk wujud nyata dari terselenggaranya perekonomian suatu daerah, dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. UMKM merupakan kelompok usaha yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah terus meningkat, tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar. SDM sebagai

salah satu unsur penunjang organisasi, dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan), atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pada organisasi yang masih bersifat tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. Organisasi tersebut masih berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat organisasi dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi SDM dengan mengelola SDM di era globalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia (SDM) perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Selain itu peran sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi tidak kecil, bahkan sebagai sentral pengelola maupun penyedia SDM bagi departemen lainnya. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan SDM, atau dengan kata lain secara

lugas MSDM dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM dalam upaya mencapai tujuan individual maupun organisasional memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi.

Salah satu hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR dengan Ibu NINA HARTATI, SH, mengatakan bahwa:

> "...Sumber Daya Manusia (SDM) para pengusaha di Kota Madiun yang berkecimpung dalam kegiatan UMKM dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu lulusan SLTA/SMK sekitar (80%), D-3 (5%), dan S-1 (5%) dan sisanya dibawah SLTA..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Fakta ini sebenarnya menepis pandangan bahwa pendidikan UMKM di Kota Madiun relatif rendah. Namun kita perlu akui juga peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti *knowledge*, *skill* dan *ability* serta *attitude* dalam berwirausaha. Semangat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung pengembangan teknologi menjadi penting dalam fokus penguatan SDM. Di sisi lain, penggunaan teknologi makin penting mengingat 60% proses produksi UMKM masih dilakukan secara sederhana. Ini mengindikasikan bahwa penguasaan IPTEK dan keahlian pemasaran oleh SDM UMKM masih sangat terbatas. Berdasarkan analisa kondisi di atas maka pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja wirausaha yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global khususnya di sektor

perdagangan dan industri. Disamping itu peningkatan SDM pemerintah daerah juga sangat diperlukan mengingat perkembangan UMKM tidak lepas dari peran serta lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah Kota Madiun yang selalu memberikan pinjaman modal, teknisi, dan memfasilitasi jaringan bisnis dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produk UMKM.

Hal ini tentunya pemerintah daerah Kota Madiun melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap perbaikan mutu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) UMKM yang ada di Kota Madiun, mencakup beberapa program pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pelaku UMKM yaitu seperti pelatihan membatik, pelatihan konveksi, pelatihan keterampilan menulis kain, pelatihan jajanan tradisional, pelatihan pembuatan kerajinan sulam, pelatihan anyaman plastik, workshop industri peningkatan kualitas produk, dan pelatihan *bussiness plan* bagi UMKM sebanyak 2 kali serta baru ditemukan pelatihan anyaman daun pandan, tetapi karena kurangnya sumber daya alam (SDA) atau bahan baku di Kota Madiun membuat anyaman daun pandan ini masih sulit untuk dikembangkan.

Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun dalam peningkatan kualitas SDM yaitu dengan pelatihan kepada calon wirausaha baru dan pelaku UMKM. Jenis pelatihan tersebut antara lain sebagai berikut ini:

a. Pelatihan Membatik

Maksud dan tujuan dari pelatihan ini agar mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki SDM UMKM agar bermanfaat untuk masyarakat diberbagai daerah. Lokasi pelatihan ini di Gedung PKPRI Jalan Dr. Soetomo Kota Madiun dengan peserta 50 orang. Instruktur atau narasumber didatangkan dari batik tulis yang sudah berkembang yaitu batik "NURUL HUDA" Kota Madiun. Tanggal pelaksanaannya Jumat, 23 Mei 2014 dan fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa:

- Konsumsi berupa *snack* dan makan siang
- Bantuan transport peserta
- Alat membatik dan materi pelatihan

b. Pelatihan anyaman plastik

Maksud dan tujuan dari pelatihan anyaman plastik ini meningkatkan kemampuan SDM UMKM dibidang kerajinan dan memanfaatkan bahan plastik yang tidak terpakai. Lokasi pelatihan ini di Jalan Gajahmada Perum Graha Kirana F/17 Winongo Kota Madiun dengan peserta 15 orang yang mendatangkan narasumber atau instruktur dari CV.WIRAPRIMA INTERNATIONAL NUR Kota Madiun. Tanggal Pelaksanaannya Selasa 03 Juni 2014 dan fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa:

- Konsumsi berupa *snack* dan makan siang
- Bantuan transport peserta
- Bahan dan alat praktik

c. Pelatihan *Business Plan* bagi UMKM sebanyak 2 kali

Maksud dan tujuan pelatihan ini yaitu meningkatkan kemampuan SDM UMKM dibidang perencanaan bisnis. Lokasi pelatihan ini di Ruang rapat Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun dengan peserta 50 orang. Instruktur atau narasumber didatangkan dari CV. SYAHRUL MANDIRI UTAMA, tanggal pelaksanaannya Rabu s/d Kamis, 18 s/d 19 Juni 2014 dan fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa:

- Konsumsi berupa *snack* dan makan siang
- Bantuan transport peserta
- ATK dan materi pelatihan

d. Pelatihan keterampilan melukis kain

Maksud dan tujuan pelatihan ini yaitu menumbuhkan wirausaha baru dan menumbuhkan lapangan kerja baru dibidang melukis kain. Lokasinya di Jalan Sawahan Kota Madiun dengan peserta 30 orang, tanggal pelaksanaan Rabu, 11 Juni 2014 dan fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa:

- Bahan dan alat praktik
- Konsumsi berupa *snack* dan makan siang
- Bantuan transport peserta
- ATK dari materi pelatihan

e. Pelatihan pembuatan kerajinan sulam

Maksud dan tujuan pelatihan ini yaitu menumbuhkan wirausahan baru dan menumbuhkan lapangan kerja baru dibidang kerajinan sulam.

Lokasi pelatihan ini di Gedung PKPRI Jalan Dr. Soetomo Kota Madiun dengan peserta 50 orang. Tanggal pelaksanaannya Kamis, 03 Juli 2014, instruktur pelatihan ini yaitu dari UD. UNIQU dan fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing peserta berupa:

- Bahan dan alat praktik
- Konsumsi berupa *snack* dan makan siang
- Bantuan transport peserta
- ATK dari materi pelatihan

Berdasarkan data tersebut jelas terbukti bahwa pemerintah daerah Kota Madiun benar-benar tanggap terhadap permasalahan di sekitarnya. Banyaknya pelatihan-pelatihan serta workshop mengenai kewirausahaan ataupun bagaimana berwirausaha dengan baik dalam rangka pemberdayaan UMKM sehingga diharapkan jenis usaha yang dikelola pun dapat berkembang dengan baik dan dapat digunakan sebagai penompang perekonomian masyarakat itu sendiri serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Penguasaan teknologi-teknologi terapan baru dapat digunakan secara bermanfaat dengan baik oleh para pelaku UMKM sehingga dengan penguasaan teknologi-teknologi baru tersebut pencapaian target produksi barang lebih maksimal sehingga keuntungan yang didapat pun bisa tercapai.

Jadi pada intinya kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada (a) Produktivitas, diukur dari jumlah *output* per tenaga

kerja, peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. Produktivitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program dan sistem manajemen. (b) Kualitas, kualitas suatu barang/jasa akan sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang/jasa yang kualitasnya buruk, perkembangan, dan kinerja organisasi tersebut akan berkurang. Dan (c) Pelayanan, SDM sering kali terlibat pada proses produksi barang/jasa. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) harus disertakan pada saat merancang proses tersebut. Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak hanya manajer, karena sering kali membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, dan kebijakan SDM.

d. Peningkatan Kualitas Teknologi

Desain merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah ada seumur dengan keberadaan manusia di bumi, hal ini sering tidak kita sadari. Akibatnya, sebagian dari kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak jaman modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. Meski dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, namun secara umum mendesain produk mempunyai mekanisme yang sama dalam berpikir kreatif untuk perancangan sebuah produk, sehingga produk tersebut memenuhi nilai-nilai fungsional yang tepat dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi manusia dengan tidak meninggalkan aspek kenyamanan *user* atau pengguna melalui teknik-teknik dan ketentuan-

ketentuan tertentu yang pada akhirnya diteruskan menjadi siklus hidup produk yang ditentukan oleh pola perancangan awal, baik itu inovasi, modifikasi, maupun duplikasi. Kualitas sebuah produk serta desain sebuah produk yang baik pastinya membutuhkan sebuah alat teknologi tepat guna. Tanpa melakukan penggunaan teknologi tepat guna yang optimal maka tidak akan ada sebuah produk yang berkualitas dengan desain yang baik.

Ibu NINA HARTATI, SH selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, mengungkapkan:

> "...penggunaan teknologi tepat guna yang optimal dalam pemberdayaan UMKM di Kota Madiun sangat diperlukan, agar produk dari pelaku UMKM mempunyai sebuah kekhasan dan diminati pasar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Madiun memberikan pelatihan terhadap penggunaan teknologi tepat guna agar produk UMKM bisa semakin baik dan berkualitas yaitu dengan cara memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi penyedia teknologi, pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk, pembuatan desain yang baik), dengan memberikan bantuan peralatan. Pentingnya kekhususan atau kekhasan suatu produk UMKM agar produk dari UMKM dapat laku dan diterima oleh pasar..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Lebih lanjut Ibu NINA HARTATI, SH selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, mengungkapkan:

> "...pelaku usaha harus dibekali dengan ketrampilan dan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan teknologi tepat guna yang optimal. Mengingat perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi apabila para pelaku usaha masih menggunakan alat yang tradisional maka pelaku usaha UMKM di Kota Madiun tidak akan mampu bersaing dengan para pelaku UMKM yang lain. Manfaat dari pelatihan penggunaan teknologi tepat guna yang optimal bagi

> para pelaku UMKM antara lain yaitu meningkatnya kualitas kemasan produk, adanya peningkatan dan bertambahnya kapasitas produksi dan mutu, pengemasan yang semakin bagus, bertambahnya jenis produk yang diproduksi, pemakaian kualitas bahan pengemas yang semakin baik, desain kemasan yang semakin baik, cara pengemasan yang rapi, memproduksi permintaan sesuai pasar (disesuaikan dengan permintaan pasar dan penyesuaian harga, kemasan dan mutu sesuai dengan permintaan pasar kelas bawah, menengah, dan atas)..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Berdasarkan pemaparan diatas pemerintah daerah Kota Madiun juga memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan teknologi tepat guna yang optimsl. Dimana saat ini strategi program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM yang dilakukan oleh pemeritah daerah Kota Madiun mengenai penggunaan teknologi tepat guna yang optoimal dilakukan dengan cara memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi, dan perusahaan penyedia teknologi. Selain itu pemerintah daerah Kota Madiun juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana pengguaan teknologi yang meliputi pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk dan pembuatan desain yang baik dengan memberikan bantuan peralatan.

2. Indikator Utama Penentu Daya Saing dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Selain itu

daya saing daerah juga merupakan kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Pada setiap daerah tentunya terdapat indikator utama penentu daya saing daerah yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam (SDA), ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, *governance* dan kebijakan pemerintah, serta manajemen dan ekonomi makro. Indikator-indikator tersebut mencakup semua sektor yang terdapat di daerah dalam meningkatkan daya saing, namun dalam hal ini hanya difokuskan pada sektor perdagangan dan industrinya saja. Indikator utama penentu daya saing dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri antara lain efektivitas dalam mencapai tujuan program pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha UMKM, efisiensi dalam pendanaan dan penggunaan teknologi informasi serta inovasi-inovasi yang dihasilkan dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri antara lain perubahan desain produk.

a. Efektif

Pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk meningkatkan daya saing perdagangan dan industri, yakni dengan kegiatan pemberdayaan UMKM diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memecahkan permasalahan perekonomian daerah. Sektor

perdagangan dan industri di Kota Madiun berupaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pengembangan dibidang UMKM guna menciptakan daerah yang mampu berdaya saing bedasarkan potensi di Kota Madiun, dalam hal ini pemerintah ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Madiun guna mencapai kinerja yang baik di mata masyarakat atau pencapaian *good governance* diterapkan guna mencapai sistem pelayanan yang lebih baik lagi yang ditunjukkan kepada masyarakat Kota Madiun. Dalam memenuhi harapan peningkatan pelayanan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan UMKM dalam hal ini seperti:

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun.

Pemerintah daerah Kota Madiun begitu gencar dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saing dibidang perekonomian daerah yaitu sektor perdagangan dan industri, maka dalam hal ini menjadi nilai positif tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Karena *good governance* sendiri mempunyai arti menurut *United Nation Development* (UNDP) adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Maksudnya dalam hal ini pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban terhadap tugas yang diemban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jadi dalam hal ini pemerintah diupayakan agar bisa menyatukan atau menjembatani antara pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun dengan para investor sehingga diharapkan dalam pertemuan tersebut dapat terjalin sebuah kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan UMKM sehingga penciptaan daerah yang berdaya saing disektor perdagangan dan industri dapat tercapai serta taraf hidup masyarakat pun meningkat. Hal ini berkaitan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana dalam UU tersebut dijelaskan jika setiap pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, dengan diberikannya kewenangan yang begitu luas oleh pemerintah pusat maka akhirnya pemerintah daerah Kota Madiun berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan pengembangan perekonomian lokal berbasis UMKM. Sehingga tujuan pemerintah daerah Kota Madiun dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri dapat berjalan dengan efektif. Karena efektivitas ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan programnya, khususnya dalam pemberdayaan

UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Dalam hal ini dinas yang mengelola sektor perdagangan dan industri melakukan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM.

Kualitas merupakan keseluruhan ciri dan karakter dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Dalam pemberdayaan UMKM ini aspek yang perlu diperhatikan dalam produk adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Apabila sebuah produk tidak dihasilkan oleh orang atau sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka produk tersebut kurang begitu baik atau berkualitas, selain itu sebuah usaha akan mempunyai hasil yang baik apabila pelaku usaha tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola sebuah bisnis atau usaha.

Ibu TATIEK WURYANDARI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang Perdagangan Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, mengungkapkan:

> "...dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, kami berusaha memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada para pelaku UMKM terhadap pentingnya kekhasan dan kekhususan suatu produk agar produk yang dihasilkan dapat laku dipasaran. Kami juga memberikan berbagai macam informasi melalui seminar serta memberikan pelatihan langsung atau pembekalan kepada para pelaku UMKM di Kota Madiun ini. Banyak sekali pelatihan yang kita berikan kepada para pelaku UMKM diantaranya yaitu pelatihan pembuatan batik, pelatihan pembuatan anyaman, sablon, accesories dari manik-manik, dan lain sebagainya. Kami menyadari kekhasan suatu produk merupakan suatu hal yang penting agar produk tersebut gampang diingat dan disukai oleh konsumen sehingga salah satu strategi pemberdayaan yang kami lakukan yaitu memberikan pembekalan mengenai hal tersebut. Dalam hal peningkatan kualitas SDM yang

kami lakukan tujuannya agar sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Madiun semakin meningkat dan mampu berdaya saing..." (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun)

Lebih lanjut Bapak MARYANTO, ST selaku Kasi Pembinaan Industri Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, menungkapkan:

"...strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh permerintah daerah Kota Madiun dengan memberikan pelatihan secara kontinyu kepada para pelaku UMKM minimal 6 kali dalam satu tahun, semua tergantung pendanaan yang ada. Dalam hal tersebut yang mengikuti kegiatan yaitu pelaku UMKM dan calon wirausaha baru. Jadi bukan hanya pelaku UMKM yang sudah ada tetapi juga memberi kesempatan kepada para calon pelaku usaha. Sehingga mereka mengetahui cara-cara dalam melakukan kegiatan usaha yang baik. Jumlah UMKM di Kota Madiun yang terdata di Dinas PERINDAGKOPPAR sampai tahun 2012 mencapai 22.998 UMKM dengan berbagai bidang (pertanian, perternakan, indutsri, perdagangan, dan sektor lainnya). Ada beberapa pengelompokkan bidang usaha yaitu pertanian atau perternakan, industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Pada sektor perdagangan dan industri yang kami data hanya 30 UMKM, UMKM tersebut hanya yang memiliki KTP berdomisili Kota Madiun, memiliki usaha yang berjalan minimal 2 tahun dan memiliki tenaga kerja..."(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Lebih lanjut MARYANTO, ST selaku Kasi Pembinaan Industri Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, menungkapkan:

"....pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindusrian Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha yaitu dengan cara melihat aspek yang lemah dari masing-masing bidang usaha, sebelum melakukan pembinaan dan pelatihan, sehingga nantinya dapat tepat dalam memberikan pembinaan dan pelatihan. Antara lain seperti managerial, produksi dan pemasaran. Pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi pertemuan rutin dilakukan oleh masing-masing UMKM yang tergabung dalam kelompok-kelompok, karena di Kota Madiun ini ada banyak kelompok usaha, jumlahnya sekitar tujuh puluhan kelompok. Sedangkan anggota dari masing-masing kelompok tergantung dari bidangnya, minimal terdiri dari 10 UMKM atau kelompok..."(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Madiun melakukan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan karena SDM atau pelaku UMKM merupakan bagian terpenting dari sebuah UMKM, dimana SDM harus menghasilkan sebuah produk yang berkualitas serta dapat melakukan manajemen yang baik untuk mengembangkan usaha serta mempertahankan usaha. Sehingga pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM atau pelaku UMKM menjadi sebuah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kefektifan pecapaian tujuan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. Semakin berkualitasnya SDM semakin efektif pula proses pencapaian tujuan pemerintah daerah khususnya di sektor perdagangan dan industri, sehingga sektor tersebut dapat berdaya saing dengan daerah lain.

Hasil yang diterima oleh sektor perdagangan dan industri dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM dalam hal peningkatan SDM yang berkualitas adalah produk-produk unggulan yang dihasilkan dari pemberdayaan UMKM dapat dipasarkan diberbagai daerah baik diluar kota maupun diluar pulau antara lain Surabaya, Probolinggo, Malang, Sumenep, Batam, Medan, Ambon, Jakarta, dan lain sebagainya khususnya produk batik tulis dari Kota Madiun. Hal ini tentu saja mempunyai nilai

positif tersendiri, diantaranya selain dapat membantu masyarakat menuju masyarakat mandiri dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, tentu saja bagi pemerintah dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Kota Madiun sehingga pembangunan di Kota Madiun dapat tercapai secara maksimal serta mampu bersaing disektor perdagangan dan industrinya.

Meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan menunjukkan pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2011-2013 pada peranan ekonomi sektor perdagangan dan industri atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Nillai PDRB ADHB (%)		
		2011	2012	2013
1.	INDUSTRI PENGOLAHAN	17,93	17,74	15,81
2.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	43,81	43,27	44,91

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau konstribusi sektor-sektor terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Perekonomian Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Nilai PDRB ADHK (%)		
		2011	2012	2013
1.	INDUSTRI PENGOLAHAN	17,95	17,35	16,19
2.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	43,20	43,27	44,34

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

Berdasarkan indeks implisit yang menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen yaitu perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga dasar konstan maka tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2013 yang mencapai 6,24% lebih kecil dibanding tahun 2012 yang mencapai 6,67% dari semua sektor yang ada di Kota Madiun. Namun pada sektor perdagangan tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2013 yang mencapai 7,58% lebih kecil dibanding tahun 2012 yang mencapai 8,30%, sedangkan pada perindustrian tingkat inflasi pada tahun 2013 yang mencapai 1,49% jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 9,20%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM mampu berdaya saing khususnya di sektor perdagangan dan industri, karena dari tahun ke tahun data menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2011-2013 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 14 Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun

Tahun 2011-2013 (%)

NO.	SEKTOR	Tingkat Inflasi PDRB (%)		
		2011	2012	2013
1.	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,17	9,20	1,49
2..	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	8,14	9,20	7,58

Sumber Data: PDRB Kota Madiun Tahun 2013

b. Efisien

Selain efektivitas, indikator utama penentu daya saing sektor perdagangan dan perindustrian Kota Madiun yaitu seberapa efisien jalannya program pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun. Pemerintah daerah Kota Madiun melakukan penanaman modal atau memfasilitasi pelaku UMKM dengan pendanaan, selain itu pemerintah daerah juga memberikan pelatihan penggunaan dan pemanfaatan teknologi terhadap pelaku UMKM, tujuannya adalah agar suatu daerah dalam menjalankan programnya khususnya pemberdayaan UMKM dapat menjadi efisien dan berdaya saing di sektor perdagangan maupun industri.

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi

digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa dimasa akan datang. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran tentunya akan menurun. Nilai investasi dan laju pertumbuhannya rata-rata per tahun mencerminkan banyak hal, mulai dari perkembangan kapasitas produksi hingga kegiatan inovasi. Investasi dalam sebuah perusahaan biasanya terkait erat dengan pengembangan kapasitas produksi, sehingga investasi yang merupakan penanaman modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.

Guna mewujudkan pembangunan ekonomi berdaya saing pada sektor perdagangan dan industri, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan UMKM penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatkannya PDRB di Kota Madiun. Dalam hal ini program pemberdayaan UMKM merupakan suatu program dimana UMKM yang ada di Kota Madiun diberdayakan, karena tidak kita pungkiri bahwa banyaknya pengangguran, banyaknya masyarakat Kota Madiun yang kurang mampu, serta semakin banyaknya usaha besar yang berdiri di Kota Madiun mengakibatkan ketimpangan sosial, dimana kurangnya kemampuan daya beli penduduk terhadap produk-produk yang beredar di Kota Madiun, sehingga mengkhawatirkan hilangnya usaha-

usaha yang lebih kecil, hal ini membuat pemerintah perlu mengadakan program pemberdayaan UMKM dimana program tersebut diupayakan, agar usaha-usaha yang sudah berdiri dapat bertahan dengan mengandalkan potensi daerah dan membuka lapangan kerja bagi pengangguran.

Program pemberdayaan UMKM diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berkeinginan untuk merintis suatu jenis usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri, selain itu juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis usaha pemberdayaan UMKM dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro yaitu usaha yang termasuk lingkup kecil. Dalam hal ini yang tergolong usaha mikro di Kota Madiun seperti penjual sayur, tukang potong rambut, penjual ayam keliling, warung nasi, warung rokok, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti sempat mewawancarai salah satu penjual soto yakni Ibu SRI LESTARI, beliau mengatakan:

> "...Saya sangat terbantu sekali dengan program pemerintah daerah dengan menjembatani usaha yang ingin saya kembangkan dengan pemilik modal, sehingga saya memperoleh modal yang saya butuhkan, syarat pinjamnya mudah dan bunganya pun rendah. Usaha warung makan saya semakin berkembang sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Saya juga berharap dengan potensi daerah lainnya, Kota Madiun dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya". ..."(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Jalan Cokroaminoto No. 9 Kota Madiun).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas terbukti bahwa program pemerintah daerah dengan menjembatani pelaku usaha dan pemilik modal dalam hal pemberian modal atas usaha yang mereka kembangkan, menjadi

alat penunjang bagi kesuksesan para pelaku UMKM terutama usaha para wiraushawan-wirausahawan yang baru merintis karirnya, sehingga sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun juga mampu bersaing.

b. Usaha Kecil merupakan suatu jenis usaha yang jumlah tenaga kerjanya 5-10 orang. Usaha kecil ini tergolong dari bengkel mobil, tukang cuci mobil, pedagang makanan dan minuman khas daerah, dan lain sebagainya.

Usaha kecil kali ini peneliti mengambil sample dari pedagang sambel pecel asli Madiun, Ibu RIA SANTIKA di daerah Winongo, Kecamatan Manguharjo, Ibu Ria Santika mengatakan:

> "....Sangat terbantu sekali mbak, dengan adanya pameran-pameran atau bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Madiun karena barang dagangan saya sekarang sudah sampai keluar kota mbak pemasarannya, di Surabaya, Malang, Jakarta hingga ada yang dikirim ke Medan maupun Ambon..."(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Jalan Demark No. 11 Kota Madiun).

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa beliau dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan bazar UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Madiun melalui dinas yang mengurusi bidang UMKM di Kota Madiun. Kegiatan ini sangat membantu para pelaku UMKM tersebut dan mereka dapat memamerkan hasil produk-produk barang hasil produksinya, sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga mereka dan produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dimasyarakat luas sehingga produk-produk yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Terselenggaranya bazar ataupun pameran-pameran

mengenai hasil prosuk-produk UMKM di Kota Madiun tentunya hal ini diupayakan dapat menarik para wisatawan domestik untuk berkunjung ke Kota Madiun dan dapat melihat barang-barang produk hasil UMKM itu sendiri. Tentunya hal ini mempunyai sisi positif tersendiri bagi sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun maupun para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan juga mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Madiun ke daerah lain.

c. Usaha Menengah: Jenis usaha yang pekerjanya bisa mencapai 10-30 orang, dan hasil penjualannya pun lebih besar dari usaha kecil. Usaha menengah di Kota Madiun ini tergolong dari pengrajin anyaman plastik, pengrajin batik, konveksi dan lukis kain, serta lain sebagainya.

Usaha menengah dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari pengusaha kerajinan membatik yang terletak di Jalan Pulanggeni RT. 16 RW. 06 (Josenan) Kota Madiun, dalam produksi produk ini yang terkenal adalah produk batik tulis yang dinamakan batik tulis "ARUM MELATI". Produk ini selalu mengikuti berbagai festival yang diadakan daerah maupun nasional salah satunya *International Embroidery Fesival 2013 Jakarta Convention Center*. Festival tersebut diselenggarakan selain untuk mendapatkan penghargaan, disisi lain juga untuk mempromosikan produk batik tulis tersebut ke seluruh penjuru Indonesia bahkan kedunia Internasional. Dalam kesempatan ini peneliti berusaha mewawancarai Ketua Paguyuban pengrajin batik tulis yakni Bapak SUYITNO dimana beliau mengatakan:

> "...program yang dilakukan pemerintah daerah Kota Madiun dalam hal pemberian modal yang menjembatani antara pelaku UMKM dan pemilik modal sangat membantu kami untuk perkembangan produksi dan memperluas kegiatan produksi barang-barang kerajinan, karena dengan modal pas-pasan, kami juga tidak bisa apa-apa hanya bisa melayani pasaran dalam Kota Madiun saja, namun setelah kami bergabung dengan klinik UMKM, maka usaha kami semakin maju dan malah bisa berkembang pesat diberbagai daerah, sehingga harapan kami sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun mampu berdaya saing dengan daerah lain..."(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2014 di Jalan Merak No. 28 Kota Madiun).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kota Madiun sendiri sudah cukup bagus, dalam hal ini banyak sekali para wirausaha-wirausaha baru ataupun para pelaku UMKM banyak yang merasa terbantu dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM itu sendiri, seperti pemberian modal, pelaksanaan pameran, dan pemberian sarana-prasarana penunjang UMKM dan lain sebagainya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan perindustrian berjalan dengan efisien. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.

Penanaman modal di Kota Madiun ini diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan industri yang berdaya saing. Penanaman modal ini dilakukan agar memudahkan pemerintah daerah di Kota Madiun dalam

menjalankan program-programnya khususnya strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Penanaman modal yang direalisasikan untuk program strategi pemrintah daerah dalam pemberdayaan UMKM yaitu sebagai berikut ini:

a. Strategi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM dengan alokasi dana Rp 198.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 174.072.000,00 atau 87,83% dengan keluaran terselenggaranya promosi produk UMKM Kota Madiun melalui 4 (empat) pameran yaitu SMESCO FESTIVAL, PPUD, dan Pameran Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut ini:

1. SMESCO FESTIVAL dilaksanakan di gedung SMESCO Jl. Gatot Subroto Jakarta dilaksanakan 6 s/d 10 Juni 2014 dengan membawa produk unggulan Kota Madiun dari UKM: UD Tri Rejeki, UD Tunas Jaya, UD Eka Rasa, UD Elim, UD Taman Sari, UD Miraos yang meliputi barang-barang kerajinan kayu, produk makanan olahan dan minuman. Peserta pameran dari seluruh kabupaten atau kota atau provinsi se-Indonesia ditambah dari Negara ASEAN.
2. Pameran Produk Unggula Daerah (PPUD EXPO 2014) dilaksanakan di Tunjungan Plaza Lt.6 Surabaya dilaksanakan 15 s/d 18 Juni 2014. kegiatan PPUD diikuti oleh kabupaten atau kota se-Jawa Timur dan para UMKM dari provinsi lain. Sementara itu Kota Madiun menyuguhkan produk unggulan dari UMKM antara lain SP murni,

kerajinan rotan, jeruk nambangan, UD Wahyu Tumurun, UD Eka Rasa, Batik Seger Arum dan Batik Panorama Wilis.

3. Kegiatan pameran produk dilaksanakan di Kota Surabaya (Gedung Jatim Expo) tanggal 16 s/d 19 Juli 2014. Dalam kegiatan pameran pasar rakyat ini Kota Madiun menampilkan produk unggulan dari UMKM antara lain Batik Seger Arum, Batik Banyu Mili, Sambel Pecel Jeruk Purut, UD Eka Rasa, UD Kardjo, UD Walet, Madumongso Wahyu Tumurun dari Lela Kerudung.

b. Strategi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Program kegiatan pengembangan beberapa bagian usaha yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, yakni dari segi sumber daya manusia (SDM) dan permodalan beralokasikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 48.000.000,00 atau 97,60% dengan keluaran terlaksananya program kegiatan pengembangan beberapa bagian usaha tersebut. Kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha dan calon wirausaha baru dengan pelatihan di Kota Madiun yang meliputi:

1. Pelatihan kerajinan kain batik yang dilaksanakan di gedung PKPRI Jl. Dr. Soetomo pada tanggal 23 Mei 2014 diikuti oleh 50 peserta dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun dengan narasumber dari batik Nurul Huda.

2. Pelatihan kerajinan sulam pita dilaksanakan di gedung PKPRI Jl. Dr. Soetomo pada tanggal 03 Juli 2014 diikuti 50 peserta dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun, dengan narasumber dari UD INIQU.

Selain itu, kegiatan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dengan alokasi dana Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100% dengan keluaran terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan akhir semester I dan II tahun 2013 dengan cara kunjungan ke UMKM penerima dana bergulir yang telah diterima dimana masih banyak UMKM penerima dana bergulir menunggak, keberadaan UMKM yang tidak jelas alias pindah tempat dan tidak memberitahu Kepala Dinas, sehingga petugas mencari informasi ke kelurahan setempat dimana UMKM pertama berkedudukan di kelurahan itu, dengan dibuktikan surat keterangan lurah tentang keberadaan UMKM.

Kemudian pemerintah daerah Kota Madiun juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan produknya, sehingga akan meningkatkan kemampuan sektor perdagangan dan industri untuk berdaya saing. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini berguna untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Kualitas produk serta desain yang baik pastinya membutuhkan sebuah alat teknologi. Tanpa menggunakan teknologi maka produk yang dihasilkan kurang berkualitas terutama dalam pembuatan desainnya.

Pemerintah Kota Madiun memberikan pelatihan penggunaan teknologi kepada para pelaku UMKM agar produk-produk mereka semakin baik dan berkualitas yaitu dengan cara memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui perusahaan-perusahaxan, perguruan tinggi penyedia teknologi dan pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi seperti pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk, dan pembuatan desain yang baik dengan memberikan bantuan peralatan. Penggunaan teknologi ini sangat diperlukan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Madiun, tujuannya adalah agar produk pelaku UMKM mempunyai sebuah kekhasan dan diminati pasar.

Mengingat perkembangan teknologi saat ini semakin maju, maka pemerintah daerah membekali pelaku usaha UMKM dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi secara maksimal. Jika pemanfaatan teknologi ini tidak dilakukan dan pelaku usaha UMKM masih menggunakan alat tradisional, maka prooduk yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak akan mampu bersaing dengan para pelaku UMKM lain yang sudah memanfaatkan teknologi. Manfaat dari pelatihan penggunaan teknologi bagi para pelaku UMKM antara lain yaitu meningkatnya kualitas kemasan produk, adanya peningkatan dan bertambahnya kapasitas produksi dan mutu, pengemasan yang semakin bagus, bertambahnya jenis produk yang diproduksi, pemakaian kualitas bahan pengemas yang semakin baik, desain kemasan yang semakin baik, cara pengemasan yang rapi, dan memproduksi permintaan sesuai pasar.

Hal ini membuktikan bahwa dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi program pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri berjalan efisien.

Selain itu, pelaku UMKM juga dibekali dengan pelatihan menggunakan teknologi informasi seperti internet sebagai akses pemasaran. Sehingga pelaku UMKM dapat memasarkan produkya kemasyarakat luas baik dalam maupun luar negeri. Pelaku UMKM juga difasilitasi online website www.disperindagkoppar.com dalam mempromosikan atau memasarkan produknya. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis dalam sektor perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing. Dalam hal ini akan tercapainya efisiensi program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan perindustrian.

c. Inovatif

Tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan programnya dapat dilihat melalui indikator atau tolok ukur bagaimana daerah dapat melakukan inovatif pada sektor-sektornya terutama sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan dan industri. Sehingga dengan adanya berbagai inovasi yang dihasilkan pada sektor tersebut dan mampu berdaya saing, maka kualitas sektor pedagangan dan industri pun semakin meningkat. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun melakukan inovasi melalui pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan

dan industri. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya adalah jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi antara lain sektor perdagangan dan perindustrian, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan UMKM memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB cukup signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Madiun menyusun strategi dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri.

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dalam hal pemberdayaan UMKM ini diarahkan pada inovasi bidang produksi dan pengolahan. Pemberdayaan UMKM pada bidang produksi dan pengolahan yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, meningkatkan rancang bangun dan rekayasa, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. Hal tersebut berhubungan desain produk, dimana desain produk saat ini banyak menjadi perhatian dari berbagai pihak, khususnya dalam kaitan upaya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya lokal, agar kondisi lingkungan yang ada dapat terpelihara disamping menghasilkan berbagai produk dan dampak yang dihasilkan tidak mencemari kondisi lingkungan.

Programnya terkait dengan proses memantapkan konsep *green product*, yang berkaitan dengan penanganan isu internasional *"global warming issue.*

Desain produk kerap kali dapat disubstitusi dengan desain produk serupa tetapi memakai bahan baku lain yang sejenis atau berbahan baku *non local* (sintetik atau bahan fisik lain). Karena itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, desain maupun kualitas produk UMKM serta ketersediaannya menjadi *issue strategi* yang harus dikelola secara optimal. Posisi desain produk kerajinan misalnya memberi nilai atau arti tertenntu. Apalagi kalau produk itu menjadi produk budaya lokal, dimana cirinya menggambarkan identitas wilayah atau kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Madiun melakukan inovasi pada desain produk melalui pemberdayaan UMKM, tujuannya yatiu untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun. Ibu TATIEK WURYANDARI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang Perdagangan Dina PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, mengungkapkan:

> "...UMKM yang dikelola Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Madiun memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM berkaitan dengan pentingnya sebuah desain, melakukan inovasi atau perubahan desain serta bagaimana desain sebuah barang atau produk yang bagus agar dapat laku dipasaran dan diminati oleh konsumen. UMKM yang dikelola Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun mengadakan pelatihan dan praktik langsung dengan mendatangkan narasumber atau instruktur (dari Dinas PRINDAGKOPPAR provinsi), dan mendapatkan alat pengemasan. Tujuan dari pelatihan mengenai pentingnya sebuah desain suatu barang atau produk tersebut yaitu

untuk menarik pangsa pasar dan konsumen dan menarik minat pembeli..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Lebih lanjut Ibu TATIEK WURYANDARI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang Perdagangan Dina PERINDAGKOPPAR Kota Madiun, mengungkapkan:

"...pelatihan yang diberkan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya sebuah desain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya jual, adanya perubahan produksi (jumlah produksi semakin meningkat, menambah jenis produk dengan cara melakukan inovasi), serta jika usaha dari UMKM tersebut semakin bagus dan berkembang tentunya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat Kota Madiun ini selain itu dapat berdaya saing pada sektor ekonomi khususnya disektor perdagangan dan industi. Perubahan desain merupakan kemasan yang tidak monoton (tidak selalu menggunakan plastik/kemasan yang transparan), memiliki kualitas yang baik, bentuk yang unik, desain, warna, gambar yang bagus dan baik yang menarik minat pangsa pasar dan konsumen (pangsa pasar untuk menengah kebawah atau menengah ke atas, anak-anak, dewasa, dan lain-lain)..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu TATIEK WURYANDARI, SE selaku Kasi Fasilitas Bidang Perdagangan, Bapak MARYANTO, ST Kasi Bidang Industri Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun menungkapkan:

"...pelatihan pemberdayaan UMKM yang kami lakukan mengenai perubahan desain yaitu dengan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan narasumber atau instruktur. Dalam pelatihan ini peserta pelatihan membawa produk UMKM masing-masing dan akan dinilai oleh narasumber atau instruktur mengenai kekurangan dan akan dievaluasi untuk memliki desain yang lebih baik. Pelatihan ini difasilitasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan

> Perindustrian Kota Madiun. Narasumber atau instruktur berasal dari provinsi, usaha dagang makanan, minuman dan kemasan..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Lebih lanjut Bapak MARYANTO, ST Kasi Bidang Industri Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun menungkapkan:

> "...tujuan dari pelatihan desain produk yang kami lakukan adalah untuk menarik minat konsumen pasar terhadap produk dari para pelaku UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa desain yang bagus dari suatu produk harus menampilkan produk yang dominan dan menarik konsumen. Manfaat yang diperoleh dari para pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan pelatihan tentang pentingnya sebuah desain yang menarik yaitu paling tidak produk dari para pelaku UMKM banyak dikenal oleh masyarakat, banyak pesanan sehingga menambah keuntungan dari para pelaku bisnis UMKM. Sementara hasil yang diperoleh dari para pelaku bisnis UMKM setelah mengikuti pelatihan mengenai desain produk yaitu produksi dan pesanan bertambah karena diminati konsumen..." (Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yaitu dengan melakukan inovasi terutama inovasi dalam perubahan desain produk. Inovasi-inovasi tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitas produk. Kualitas sebuah produk baik yang konvensional maupun yang lebih strategik, yaitu bahwa pada dasarnya kualitas mengarah pada pengertian pokok. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun attraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk tersebut, kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari

kekurangan atau kerusakan. Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya suatu produk dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dibuat dengan cara yang baik dan benar. Jadi, jika inovasi dalam sektor perdagangan dan industri ini menghasilkan kearah yang lebih baik, maka kualitas suatu daerah pun semakin meningkat sehingga pada sektor perdagangan dan industri ini pun mampu berdaya saing.

Lebih lanjut Bapak MARYANTO, ST Kasi Bidang Industri Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun mengungkapkan:

> "...hasil dari strategi pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM yang kami lakukan tidak sia-sia, setelah mengikuti para pelaku UMKM melakukan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, mereka mempraktikkannya secara langsung namun juga ada beberapa pelaku UMKM yang masih enggan untuk mencoba pelatihan yang kami jelaskan. Dampak dari berbagai pelatihan yang kami lakukan ada beberapa UMKM yang semakin maju dan berkembang, dari yang sebelumnya masih tergolong kecil hingga menjadi UMKM yang cukup dikenal saat ini. Adapun para pelaku UMKM yang berhasil dan berkembang dalam melakukan perubahan desain serta inovasi produk yakni ada UMKM Wahyu Tumurun, UMKM Batik Slamet, UMKM Anyaman Plastik, UMKM Taman Sari dan lain sebagainya. Beberapa UMKM tersebut mengganti desain produk dengan yang baru dari sebelumnya agar menarik minat dari masyarakat dan produknya lebih dikenal oleh pasar karena desainnya yang menjadi lebih menarik..."(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014 di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun).

Suatu desain harus dibuat sedemikian rupa agar menarik sehingga menimbulkan kenikmatan estetis. Hal ini penting dalam meningkatkan cita rasa seseorang atau masyarakat maupun konsumen. Oleh karena itu perlu diperhatikan:

1. Kombinasi dengan bahan lain, kombinasi mengandung arti memadukan dua unsur atau bahan yang berbeda. Dalam pembuatan desain produk sangat dimungkiinkan dengan adanya kombinasi bahan yang akan menghasilkan suatu produk yang inovatif dan mengandiung unsur kebaharuan dan keunikkan (*uniquenes*).
2. Penyelesaian detail dan finishing sebuah desain merupakan rencan yang akan diimplementasikan dalam karya jadi. Jika sebuah produk dikerjakan secara serampangan akan terlihat tidak profesional. Oleh karena itu setiap detail dari produk yang dihasilkan harus dicermati secara seksama, karena kualitas suatu produk dangat tergantung dari bagaimana penyelesaian detail dan finishingnya dikerjakan dengan sempurna,
3. Estetika dan daya tarik desain tidak sekedr membuat struktur, konstrukri dan bentuk saja, namun dalam pembuatan benda dihubungkan dengan segi keindahan dan keserasian, yang merupakan faktor penting dalam desain, karena sekuat apapun konstruksinya, sebagus apapun bahannya, jika tidak memiliki sentuhan keindahan maka tidak akan diminati oleh konsumen,
4. Spirit dan gaya jaman, senantiasa menandai style suatu desain produk,
5. Pengelolaan bentuk sesuai struktur dari karakter bahan. Bentuk yang tercipta juga sangat ditentukan oleh bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki karakteristiknya masing-masing yang menjadi ciri

khas dan pembeda dari bahan lainnya. Setiap bahan pun membawa kesan dan citra tertentu.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Madiun memiliki pengaruh positif bagi para pelaku UMKM. Walaupun tidak semua para pelaku UMKM bersedia menerapkan apa yang dipelajari dalam berbagai pelatihan, namun ada beberapa pelaku UMKM yang mengikuti arahan dari pelatihan tersebut dan mengalami perubahan yang bagus terhadap usaha yang dikelolanya. Desain merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah produk, produk sebagus apapun kalau desainnya kurang menarik akan kurang diminati oleh konsumen, tetapi kalau sebuah desain tersebut dibuat menarik maka konsumen akan tertarik dan akan mencoba produk tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu berusaha melakukan inovasi terutama di sektor perdagangan dan industri melalui pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini pemeintah daerah melakukan inovasi ddalam perubahan desain produk yang bertujuan agar sektor perdagangan dan industri mampu berdaya saing dibidangnya khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Selain diberikan penjelasan, para pelaku UMKM diajak untuk langsung mempraktikkan materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut, bahkan para pelaku UMKM juga sempat disuruh membawa masing-masing produknya untuk dinilai dan diberikan arahan bagaimana agar produk tersebut lebih menarik dan disukai oleh konsumen. Kesimpulannya aktivitas yang inovatif dalam menciptakan pengetahuan baru sangat

krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.

D. Analisis Data

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri

Berdasarkan program kerja serta kebijakan yang dibuat oleh UMKM Kota Madiun maka dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah di Kota Madiun dalam hal ini telah melakukan tugasnya dengan baik, dimana mereka berusaha untuk memberdayakan masyarakat Kota Madiun dengan kegiatan ataupun program pemberdayaan masyarakat yakni pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun itu sendiri. Pemberdayaan sendiri mempunyai arti yang begitu luas. Menurut Wahyono (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun hanya memfasilitasi kegiatan UMKM yang semua itu sudah terangkum pada program kerja UMKM Kota Madiun sehingga UMKM yang ada di Kota Madiun tersebut mampu untuk berkembang dengan bagus dan lebih profesional lagi. Mengingat poin-poin penting mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM seperti kebijakan memfasilitasi bantuan permodalan untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk

peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM UMKM membuat pemerintah sangat berperan aktif dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian daerah dan mampu bersaing diberbagai daerah khususnya disektor perdagangan dan industri.

Berdasarkan salah satu poin kebijakan pengembangan wirausaha mandiri sektor informal dan tenaga kerja terdidik menguatkan kita bahwa pemerintah Kota Madiun benar-benar peduli terhadap kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat yang kurang mampu, dimana mereka dididik dan dilatih agar menjadi masyarakat yang tangguh, kreatif dan mandiri sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengingat jumlah masyarakat yang kurang mampu di Kota Madiun sendiri cukuplah tinggi. Hal ini tentunya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup maksimal, namun masih kurang mengenanya sasaran program pemberdayaan UMKM terhadap masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas permodalan bagi masyarakat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana untuk mendapatkan modal usaha baru sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Kota Madiun sendiri. Tentu diperlukan perubahan dan perbaikan untuk kegiatan kedepannya. Karena telah diketahui di lapangan bahwa bunga pinjaman yang diberikan oleh UMKM Kota Madiun cukup rendah dan bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi terhadap program-program pemberdayaan UMKM

dirasa cukup tepat mengingat jika program pemerintah itu dibuat agar dapat membantu masyarakat dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang berkaitan tentang pengangguran dan masalah perekonomian lainnya. Program pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi dari semua permasalahan tersebut. Namun kenyataannya dilapangan jika program pemberdayaan UMKM yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu dinas yang terkait dengan bidang UMKM di Kota Madiun sudah mengena pada pelaku UMKM kebanyakan masyarakat yang kena hasil binaan pemerintah daerah sangat merasa terbantu dan itu pun menjadikan lebih bisa mandiri dan sukses dalam menjalani usahanya.

a. Peningkatan Permodalan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan UMKM di Kota Madiun mengalami gulung tikar diantaranya yaitu salah pengelolaan dari aspek managerial, dan aspek produksi yang dilakukan oleh UMKM, kemudian ketersediaan bahan baku bagi UMKM tertentu yang kebetulan bahan bakunya sulit atau tidak terdapat di Kota Madiun, dan yang terakhir adalah dari segi permodalan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Sehingga hal ini menyebabkan UMKM yang ada di Kota Madiun kurang mampu bersaing dengan usaha yang berskala besar lainnya.

Permodalan merupakan sebuah faktor penting bagi kelangsungan usaha dan perkembangan usaha dari pera pelaku UMKM, tanpa adanya sebuah modal maka UMKM tidak akan bisa berdiri sendiri serta tanpa

adanya tambahan modal maka UMKM juga akan sulit untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar kedepannya. Sehingga salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun terhadap pengembangan UMKM yaitu meningkatkan akses permodalan.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Madiun dalam peningkatan akses permodalan bagi para pelaku UMKM yaitu dengan menjembatani pemilik modal dengan pelaku UMKM, agar pelaku UMKM membuat proposal yang ditujukan kepada pemilik modal serta melengkapi persyaratan untuk menerima pinjaman modal yang selanjutnya pemerintah daerah dan pemilik modal melakukan survei kepada usaha yang dikembangkan apakah layak atau tidak untuk diberikan pinjaman modal, hal tersebut dilakukan agar memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh permodalan dari perbankan maupun non perbankan yaitu PT.INKA dan PERURI agar bekenan memberikan modal bagi para pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan teori Situmorang (2008:87) yaitu peningkatan permodalan bagi UMKM dilakukan antara lain melalui program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses permodalan yaitu sudah benar-benar punya usaha minimal yang berjalan dua tahun dan menunjukkan peningkatan selama mengembangkan usahanya, memiliki tenaga kerja, memiliki jaminan berupa BPKB atau sertifikat dan berdomisili KTP Madiun. Tanpa adanya

persyaratan tersebut maka mereka akan kesulitan dalam memperoleh akses permodalan baik perbankan maupun lembaga lainnya

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa permodalan merupakan hal yang penting bagi terciptanya sebuah UMKM serta berkembangnya sebuah UMKM dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Tanpa adanya sebuah modal dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami gulung tikar terhadap usahanya dan kurang mampu bersaing dengan usaha lainnya. Keterbatasan modal juga membuat para pelaku UMKM sulit untuk berkembang dan mempertahankan kelangsungan usahanya serta tidak akan mampu bersaing disektor ekonomi yaitu sektor perdagangan dan industri. Keterbatasan modal berakibat terhadap kualitas produk bagi para pelaku UMKM menjadi kurang baik serta tidak bisa melakukan pengembangan produk untuk kelangsungan usaha dari para pelaku UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Madiun diharapkan mampu memberikan bantuan untuk mendapat modal bagi jalannya kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Madiun, agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan usaha lainnya.

b. Pengembangan Pasar UMKM

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang pengembangan pasar dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah Kota Madiun memasarkan produk UMKM melalui kegiatan pemberian fasilitas gedung SMESCO, gedung pamer dan gedung souvenir, serta

menyelenggarakan pameran dalam rangka hari jadi Expo Nasional agar pelaku UMKM dapat memasarkan produknya dan diketahui masyarakat luas. Selain itu pemerintah daerah juga membantu para pelaku UMKM dalam pemasaran melalui online website yaitu www.disperindagkoppar.com, leaflet, brosur, mengadakan kerjasama atau tim bisnis dengan daerah lain.

Selain memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, pemerintah daerah Kota Madiun juga memberikan pelatihan mengenai pemasaran sebuah produk yang bagus agar produk tersebut dapat dipasarkan dan sampai kepada tangan konsumen yang membutuhkan. Suatu produk UMKM agar laku dipasaran meliputi beberapa tahapan dasar yang dapat dilakukan untuk merumuskan secara sistemtis dan kreatif, yaitu sebagai berikut ini:

a. Perhatikan siapa pesaing dekat anda dan apa yang mereka berikan. Karena pesaing merupakan sumber inspirasi dan cermin yang bagus untuk berkaca, agar anda pun dapat mengevaluasi produk yang anda pasarkan.
b. Pergunakan atribut-atribut dengan ciri khas, yaitu sebagai alat untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan yang menyenangkan bagi pelanggan anda.
c. Pahami betul siapa pelanggan anda dan selera, gaya, keinginan, kebutuhan dan peubahannya.

d. Berikan pelatihan kepada setiap petugas garda depan (*frontliner*) dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengenalkan keunggulan produk yang anda miliki.
e. Lakukan evaluasi sesering mungkin dan mintalah pendapat kepada pelanggan anda untuk memberikan masukan, saran maupun kritik mengenai produk dan bisnis anda, apa saja yang kurang dan apa yang perlu untuk dilakukannya upaya peningkatan

Produk yang dihasilkan para pelaku UMKM merupakan hal yang cukup penting dalam kebutuhan pasar, banyak yang berkaitan dengan masalah kebutuhan sekunder, walaupun ada sebagian kecil kebutuhan primer, namun dengan keberagaman jenis atau macam produk yang relatif terbatas sasarannya. Dalam hubungan itu desain produk, kerap kali dapat disubstitusi dengan desain produk serupa tetapi memakai bahan baku lain yang sejenis atau berbahan baku *non local*. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, desain maupun kualitas produk UMKM serta ketersediaannya menjadi isu startegis yang harus dikelola secara optimal. Posisi desain produk kerajinan misalnya memberi nilai atau arti tertentu. Apalagi kalau produk itu menjadi produk budaya lokal, dimana cirinya menggambarkan identitas wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun berusaha menciptakan sebuah produk yang varian dan inovatif agar masyarakan atau konsumen tidak jenuh dengan produk yang dipasarkan. Hal ini sesuai dengan teori Situmorang (2008:87) yang menyatakan bahwa teori ekonomi

menjelaskan bahwa konsep pemasaran meliputi empat unsur pendukung yaitu produk, harga, tempat atau lokasi dan promosi produk. Keempat aspek ini saling terkait dalam meningkatkan fungsi pemasaran. Dari keempat unsur tersebut promosi dalam upaya memperkenalkan produk dan mengembangkan jaringan pasar merupakan kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh UMKM baik secara mandiri maupun dengan bantuan para stakeholder terutama pemerintah. Kegiatan ini memang memiliki posisi strategis sebagai faktor kunci yang menghubungkan atau memperkenalkan produk yang dihasilkan UMKM kepada konsumen atau pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bisnis, apabila perusahaan hanya membuat produk yang berkualitas saja namun kurang mempunyai strategi pemasaran yang baik maka produk tersebut tidak akan dikenal oleh pasar dan produk tersebut tidak akan sampai kepada konsumen yang sebenarnya membutuhkan produk tersebut. Sehingga pemasaran terhadap sebuah produk merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, dimana pemerintah daerah di Kota Madiun memfasilitasi hasil produk UMKM tersebut untuk dipasarkan, sehingga dikenal oleh pasar maupun konsumen.

c. Peningkatan Kualitas SDM

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, jika dilihat dari tingkat pendidikannya SDM (Sumber Daya Manusia) para pengusaha di Kota Madiun yang berkecimpung dalam kegiatan UMKM yaitu lulusan

SLTA/SMK sekitar (80%), D-3 (5%), S-1 (5%) dan sisanya dibawah SLTA. Fakta ini sebenarnya menepis pandangan bahwa pendidikan pelaku UMKM di Kota Madiun relatif rendah. Namun kita perlu akui juga peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti *knowledge*, *skill* dan *ability* serta *attitude* dalam berwirausaha. Oleh karena itu, berbagai macam infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia (MSDM) perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan teori Situmorang (2008:87) yaitu peningkatan kualitas SDM merupakan kegiatan sentral yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Namun demikian berbagai indikasi menunjukkan bahwa bentuk pendidikan formal tidak semua dapat menjamin peningkatan pengetahuan dari kelompok UMKM. Sebaliknya ada indikasi, bahwa sebagian UMKM tumbuh motivasi keterpaksaan karena mereka tidak mendapat lapangan kerja atau belum mendapatkan lapangan pekerjaaan yang sesuai. Dengan demikian nampaknya dari aspek pendidikan formal sebagian UMKM sudah cukup baik tetapi dari keterampilan atau profesionalisme kondisi mereka masih perlu dipertanyakan. Dari sebab itu berbagai upaya yang telah dilakukan sendiri oleh UMKM antara lain adalah dengan belajar sendiri-sendiri (otodidak) atau ikut magang pada usaha sejenis yang telah ada sebelumnya.

Semangat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung pengembangan teknologi menjadi penting dalam fokus

penguatan SDM. Di sisi lain, penggunaan teknologi makin penting mengingat 60% proses produksi UMKM masih dilakukan secara sederhana. Ini mengindikasikan bahwa penguasaan IPTEK dan keahlian pemasaran oleh SDM UMKM masih sangat terbatas. Sehingga hal ini dapat menyebabkan produk UMKM kurang mampu bersaing dengan usaha besar lainnya.

Berdasarkan analisa kondisi di atas maka pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja wirausaha yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global khususnya di sektor perdagangan dan industri. Disamping itu peningkatan SDM pemerintah daerah juga sangat diperlukan mengingat perkembangan UMKM tidak lepas dari peran serta lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah Kota Madiun yang selalu memberikan pinjaman modal, teknisi, dan memfasilitasi jaringan bisnis dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produk UMKM.

Hal ini tentunya pemerintah daerah Kota Madiun melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap perbaikan mutu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) UMKM yang ada di Kota Madiun, mencakup beberapa program pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pelaku UMKM yaitu seperti pelatihan membatik, pelatihan konveksi, pelatihan keterampilan menulis kain, pelatihan jajanan tradisional, pelatihan pembuatan kerajinan sulam, pelatihan anyaman plastik, workshop industri peningkatan kualitas produk, dan pelatihan

bussiness plan bagi UMKM sebanyak 2 kali serta baru ditemukan pelatihan anyaman daun pandan, tetapi karena kurangnya sumber daya alam (SDA) atau bahan baku di Kota Madiun membuat anyaman daun pandan ini masih sulit untuk dikembangkan.

Berdasarkan data tersebut jelas terbukti bahwa pemerintah daerah Kota Madiun benar-benar tanggap terhadap permasalahan di sekitarnya. Banyaknya pelatihan-pelatihan serta workshop mengenai kewirausahaan ataupun bagaimana berwirausaha dengan baik dalam rangka pemberdayaan UMKM sehingga diharapkan jenis usaha yang dikelola pun dapat berkembang dengan baik dan dapat digunakan sebagai penompang perekonomian masyarakat itu sendiri serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun. Penguasaan teknologi-teknologi terapan baru dapat digunakan secara bermanfaat dengan baik oleh para pelaku UMKM sehingga dengan penguasaan teknologi-teknologi baru tersebut pencapaian target produksi barang lebih maksimal sehingga keuntungan yang didapat pun bisa tercapai.

d. Peningkatan Kualitas Teknologi

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai peningkatan kualitas teknologi dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah Kota Madiun memberikan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna terhadap pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan mempunyai sebuah kekhasan, diminati pasar, semakin baik dan berkualitas yaitu dengan cara memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui

perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi, penyedia teknologi, pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk, pembuatan desain yang baik) dengan memberikan bantuan peralatan. Pentingnya kekhususan atau kekhasan suatu produk UMKM agar produk dari UMKM dapat laku dan diterima oleh pasar.

Selain itu pelaku usaha juga harus dibekali dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan kualitas tekonologi dalam penggunaan teknologi tepat guna yang optimal. Mengingat perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi apabila para pelaku usaha masih menggunakan alat yang tradisional maka pelaku usaha UMKM di Kota Madiun tidak akan mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Situmorang (2008:87) yaitu pengembangan teknologi produksi tidak harus selalu diorientasikan pada perkembangan teknologi introduksi, tetapi juga harus dipertimbangkan adanya pengembangan teknologi oleh masyarakat lokal yang jika difasilitasi oleh pemerintah mungkin hasilnya juga lebih baik dari teknologi yang diintoduksi. Demikian juga penelitian dan pengembangan teknologi produksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian perlu mendapat dorongan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya dengan melakukan lomba dan sayembara. Manfaat dari pelatihan penggunaan teknologi tepat guna yang optimal bagi para pelaku UMKM antara lain yaitu meningkatnya kualitas kemasan produk, adanya peningkatan dan bertambahnya kapasitas produksi dan mutu, pengemasan yang semakin

bagus, bertambahnya jenis produk yang diproduksi, pemakaian kualitas bahan pengemas yang semakin baik, desain kemasan yang semakin baik, cara pengemasan yang rapi, memproduksi permintaan sesuai pasar (disesuaikan dengan permintaan pasar dan penyesuaian harga, kemasan dan mutu sesuai dengan permintaan pasar kelas bawah, menengah, dan atas). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pelatihan dan pemberian fasilitas dalam peningkatan kualitas teknologi terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, diharapkan mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar lainnya.

2. Indikator Utama Penentu Daya Saing dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri

Kota Madiun merupakan kota yang mempunyai berbagai sarana dan prasarana akomodasi yang memadai antara lain hotel berbintang, penginapan, dan biro perjalanan serta sarana umum lainnya. Walaupun potensi ekonomi Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, pemerintah daerah tetap memiliki upaya untuk memajukan perekonomian di Kota Madiun yang mampu berdaya saing khususnya di sektor perdagangan dan industri. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomiannya yaitu mengandalkan pada sektor idustri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi dan kostribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut

antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuktikan bahwa program pemerintah daerah dijalankan dengan baik. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi sektor perdagangan dan perindustrian melalui pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing dalam daerah diperlukan adanya indikator atau tolok ukur yang disebut indikator penentu daya saing. Hal ini sesuai dengan teori Pitter Abdullah (2002) dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia menyatakan bahwa indikator penentu daya saing daerah adalah perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur, dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, *Governance*, dan kebijakan pemerintah, dan manajemen dan ekonomi makro. Namun pada strategi pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri ini hanya menggunakan indikator penentu daya saing perekonoian daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Efektif

Berdasarkan kajian dilapangan pemberdayaan UMKM di Kota Madiun memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di

Kota Madiun. Pada hal ini pemerintah Kota Madiun sebagai pihak yang memberikan program strategi pemberdayaan UMKM dan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembangkan perekonomian daerah sehingga mampu bersaing disektor ekonomi yaitu perdagangan dan industri.

Pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk meningkatkan daya saing potensi daerah khususnya di sektor perdagangan dan industri, diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM untuk mencapai tujuan secara efektif sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sumihardjo (2008:8) bahwa didalam stretegi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Kualitas merupakan keseluruhan ciri dan karakter dari sebuah jasa atau produk yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Pada pemberdayaan UMKM aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM dan kualitas produk dari pelaku UMKM. Jika produk yang dihasilkan ingin berkualitas, maka SDM pelaku UMKM pun harus berkualitas. Selain itu sebuah usaha akan mempunyai

hasil yang baik apabila pelaku usaha tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola sebuah bisnis atau usaha.

Upaya pemerintah daerah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha yaitu mereka berusaha memberikan pelatihan dan pengetahuan serta kesadaran kepada para pelaku UMKM terhadap pentingnya kekhasan dan kekhususan suatu produk agar produk yang dihasilkan dapat laku dipasaran. Pemerintah Kota Madiun juga memberikan berbagai macam informasi melalui seminar serta memberikan pelatihan langsung atau pembekalan kepada para pelaku UMKM di Kota Madiun. Banyak sekali pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM diantaranya yaitu pelatihan pembuatan batik, pelatihan pembuatan anyaman, sablon, accesories dari manik-manik, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan teori Pitter Abdullah (2002) mengenai indikator penentu daya saing dilihat berdasarkan sumber daya manusianya (SDM), menurut Pitter Abdullah (2002) pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.

Kekhasan suatu produk merupakan suatu hal yang penting agar produk tersebut gampang diingat dan disukai oleh konsumen sehingga salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun yaitu memberikan pembekalan mengenai hal tersebut. Dalam hal peningkatan kualitas SDM memiliki tujuan agar sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Madiun semakin meningkat dan mampu berdaya saing.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh permerintah daerah Kota Madiun yaitu dengan memberikan pelatihan secara kontinyu kepada para pelaku UMKM minimal 6 kali dalam satu tahun, semua tergantung pendanaan yang ada. Dalam hal tersebut yang mengikuti kegiatan yaitu pelaku UMKM dan calon wirausaha baru. Jadi bukan hanya pelaku UMKM yang sudah ada tetapi juga memberi kesempatan kepada para calon pelaku usaha. Sehingga mereka mengetahui cara-cara dalam melakukan kegiatan usaha yang baik. Jumlah UMKM di Kota Madiun yang terdata di Dinas PERINDAGKOPPAR sampai tahun 2012 mencapai 22.998 UMKM dengan berbagai bidang (pertanian, perternakan, indutsri, perdagangan, dan sektor lainnya). Ada beberapa pengelompokkan bidang usaha yaitu pertanian atau perternakan, industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Pada sektor perdagangan dan industri yang kami data hanya 30 UMKM, UMKM tersebut hanya yang memiliki KTP berdomisili Kota Madiun, memiliki usaha yang berjalan minimal 2 tahun dan memiliki tenaga kerja.

Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha yaitu dengan cara melihat aspek yang lemah dari masing-masing bidang usaha, sebelum melakukan pembinaan dan pelatihan, sehingga nantinya dapat tepat dalam memberikan pembinaan dan pelatihan. Antara lain seperti managerial, produksi dan pemasaran. Pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi pertemuan rutin dilakukan oleh masing-masing UMKM yang tergabung

dalam kelompok-kelompok, karena di Kota Madiun ini ada banyak kelompok usaha, jumlahnya sekitar tujuh puluhan kelompok. Sedangkan anggota dari masing-masing kelompok tergantung dari bidangnya, minimal terdiri dari 10 UMKM atau kelompok. Hal tersebut dilakukan karena SDM atau pelaku UMKM merupakan bagian terpenting dari sebuah UMKM, dimana SDM harus menghasilkan sebuah produk yang berkualitas serta dapat melakukan manajemen yang baik untuk mengembangkan usaha serta mempertahankan usaha. Sehingga pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM atau pelaku UMKM menjadi sebuah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kefektifan pecapaian tujuan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. Semakin berkualitasnya SDM semakin efektif pula proses pencapaian tujuan pemerintah daerah khususnya di sektor perdagangan dan industri, sehingga sektor tersebut dapat berdaya saing dengan daerah lain.

Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Madiun khususnya pada sektor perdagangan dan industri dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM dalam hal peningkatan SDM yang berkualitas adalah produk-produk unggulan yang dihasilkan dari pemberdayaan UMKM dapat dipasarkan diberbagai daerah baik diluar kota maupun diluar pulau antara lain Surabaya, Probolinggo, Malang, Sumenep, Batam, Medan, Ambon, Jakarta, dan lain sebagainya khususnya produk batik tulis

dari Kota Madiun. Hal ini tentu saja mempunyai nilai positif tersendiri, diantaranya selain dapat membantu masyarakat menuju masyarakat mandiri dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, tentu saja bagi pemerintah dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Kota Madiun sehingga pembangunan di Kota Madiun dapat tercapai secara maksimal serta mampu bersaing disektor perdagangan dan industrinya. Meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan menunjukkan pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa program pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri melalui peningkatakan kualitas berjalan dengan efektif. Efektifnya suatu program merupakan indikator penentu daya saing daeah di sektornya terutama sektor perdagangan dan industri.

b. Efisien

Efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Madiun dalam peningkatan sektor perdagangan dan industri yang berdaya saing. Dalam pencapaian program yang efisien, pemerintah daerah memfokuskan dalam hal pendanaan atau penanaman modal dan penggunaan teknologi. Hal ini sesuai denga teori Pitter abdullah (2002) yaitu efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetiitif, akumulasi

modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, sektor keuangan yang efisien dan integrasi secara internasional mendukung daya saing daerah, keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien serta teknologi informasi yang maju metupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

Penanaman modal pemerintah daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pananam modal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sektor perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan tersebut dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi lokal dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya konstribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB Kota Madiun.

Pada program strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan sektor perdagangan dan industri, efisiennya pendanaan digunakan sebagai salah satu indikator penentu daya saingnya. Hal ini disebabkan karena sektor perdagangan dan industri merupakan

sektor yang berkaitan dengan kemajuan perekonomian daerah. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Jumlah modal usaha yang dapat difasilitasian kepada Koperasi dan UMKM di Kota Madiun pada tahun 2013 mencapai Rp 48,571 Milyar, terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu awal program strategi pemerintah Kota Madiun diimplementasikan yang mencapai Rp 48,242 Milyar. Peningkatan ini membuktikan bahwa program pemerintah berjalan dengan efisien. Jumlah modal usaha yang difasilitasikan tahun 2013 tersebut sejumlah Rp 48.471.000,00 yang direalisasikan kepada 30 UMKM dari dana BUMN, yaitu sebagai berikut

a. PERURI sejumlah : Rp 470.000.000,00

b. PT. INKA sejumlah : Rp 575.000.000,00

Jumlah : Rp 1.045.500.000,00

Sedangkan sisanya direalisasikan melalui dana pemerintah kepada KPRI/KSU/KSP Koperasi di Kota Madiun.

Penerima program strategi program pemberdayaan UMKM juga merasa banyak terbantu sekali dengan adanya program tersebut seperti kegiatan pemberian fasilitas permodalan, sarana prasarana penunjang kegiatan UMKM, pembianaan pelatihan terhadap pelaku UMKM dan masih banyak lagi kegiatan dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Madiun. Hal ini mengingat juga jumlah angka pengangguran dan jumlah penduduk kurang mampu yang ada di Kota Madiun sendiri jumlahnya sangat banyak, mengakibatkan taraf hidup masyarakat pun

dibawah stadar hidup yang layak. Hal ini tentunya akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian terutama disektor perdagangan dan industri pembangunan di Kota Madiun.

Banyaknya program strategi pemberdayaan masyarakat seperti UMKM tersebut diharapkan pemerintah mampu menciptakan suatu keadaan masyarakat yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing di perdagangan dan industri. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa adanya asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM. Adanya kajian tersebut terlihat jelas jika UU tersebut masyarakat dapat mandiri walaupun mendapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai inovator saja atau stimulan sehingga UMKM dalam hal ini bergerak sendiri dan berpikir kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Banyak sekali para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun berhasil dalam berbagai jenis usaha yang ditekuninya. Fakta tersebut terlihat jelas dengan data yang diperoleh dilapangan jika UMKM yang ada di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2011 UMKM yang ada di Kota Madiun terdaftar 22.790 UMKM dan meningkat tahun 2012 mencapai 22.998 UMKM. Hal tersebut menjadi prestasi yang membanggakan, mengingat upaya pemerintah daerah di Kota Madiun sendiri dalam menciptakan suatu keadaan

masyarakat yang mandiri dalam hal perekonomian hidupnya begitu gencar digalakkan. Hal ini tentu saja menjadi poin penting bagi masyarakat Kota Madiun dalam mengembangkan jiwa kreatif, tangguh dan mandiri dalam melakukan wirausahanya. Kebanyakan pelaku UMKM di Kota Madiun merasa sangat terbantu dalam upaya pemerintah daerah menyediakan program-program strategi pemberdayaan UMKM yang dibuat dan dikelola pemerintah daerah Kota Madiun tersebut. Banyak pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun yang tidak terjerat pada lintah darat, karena pemerintah daerah di Kota Madiun sudah memfasilitasi kegiatan jenis usaha UMKM tersebut, seperti modal, sarana prasarana serta pembinaan terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya kembali program pemberdayaan tersebut agar masyarakat pelaku UMKM tersebut lebih profesional, tangguh dan mandiri.

Selain pendanaan, pemerintah daerah Kota Madiun juga memberikan pelatihan dan pemanfaatan teknologi baik dibidang pembuatan desain maupun pemanfaatan teknologi informasi seperti internet. Tujuan dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pembuatan desain yaitu agar produk yang dihasilkan pelaku UMKM memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi penyedia teknologi, pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi dalam hal pewarnaan batik, pembuatan produk, pengemasan produk, dan pembuatan desain yang baik serta memberikan bantuan peralatan. Manfaat dari pelatihan

penggunaan teknologi bagi para pelaku UMKM antara lain meningkatnya kualitas kemasan produk, adanya peningkatan dan bertambahnya kapasitas produksi dan mutu, pengemasan yang semakin bagus, bertambahnya jenis produk yang diproduksi, pemakaian kualitas pengemasan yang rapi, dan memproduksi permintaan sesuai pasar.

Kemudian pemerintah daerah juga memberikan pelatihan dalam penggunaan akses internet. Akses internet ini digunakan dalam pemasaran hasil produk pelaku UMKM, agar produk yang dihasilkan dapat tersebar diseluruh penjuru daerah. Pemerintah daerah memberikan fasilitas online website www.disperidagkoppar.com bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dan mengadakan kerjasama atau tim bisnis dengan daerah lain sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sumihardjo (2008:8) bahwa didalam stretegi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Upaya pemerintah ini membuktikan bahwa program pemerintah Kota Madiun berjalan efisien, sehingga sektor perdagangan dan industripun memiliki daya saing yang lebih baik.

c. Inovatif

Indikator keberhasilan daya saing sektor perdagangan dan industri dalam pemberdayaan UMKM di Kota Madiun yakni seberapa besar inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM khususnya dalam hal

pengembangan produk dan pengolahan. Pemberdayaan UMKM pada bidang produksi dan pengolahan yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, meningkatkan rancang bangun dan rekayasa, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. Hal tersebut berhubungan desain produk, dimana desain produk saat ini banyak menjadi perhatian dari berbagai pihak, khususnya dalam kaitan upaya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya lokal, agar kondisi lingkungan yang ada dapat terpelihara disamping menghasilkan berbagai produk dan dampak yang dihasilkan tidak mencemari kondisi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Madiun melakukan inovasi pada desain produk melalui pemberdayaan UMKM, tujuannya yatiu untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan teori Pitter Abdullah (2002) yang menyatakan bahwa investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif menciptakan pengetahuan baru snagat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pengembangan eknomi yang lebih maju. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Madiun memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM berkaitan dengan pentingnya sebuah desain, melakukan inovasi atau perubahan desain serta bagaimana desain sebuah barang atau produk yang bagus agar dapat laku dipasaran dan diminati oleh konsumen. UMKM yang dikelola Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun mengadakan pelatihan dan praktik langsung dengan mendatangkan narasumber atau instruktur (dari Dinas PRINDAGKOPPAR provinsi), dan mendapatkan alat pengemasan. Tujuan dari pelatihan mengenai pentingnya sebuah desain suatu barang atau produk tersebut yaitu untuk menarik pangsa pasar dan konsumen dan menarik minat pembeli.

Pelatihan yang diberkan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya sebuah desain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya jual dan adanya perubahan produksi (jumlah produksi semakin meningkat, menambah jenis produk dengan cara melakukan inovasi), serta jika usaha dari UMKM tersebut semakin bagus dan berkembang tentunya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat Kota Madiun. Selain itu dapat berdaya saing pada sektor ekonomi khususnya disektor perdagangan dan industi. Perubahan desain merupakan kemasan yang tidak monoton (tidak selalu menggunakan plastik/kemasan yang transparan), memiliki kualitas yang baik, bentuk yang unik, desain, warna, gambar yang bagus dan baik yang menarik minat pangsa pasar dan konsumen (pangsa pasar untuk menengah kebawah atau menengah ke atas, anak-anak, dewasa, dan lain-lain.

Pelatihan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun mengenai perubahan desain yaitu dengan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan narasumber atau instruktur.

Dalam pelatihan ini peserta pelatihan membawa produk UMKM masing-masing dan akan dinilai oleh narasumber atau instruktur mengenai kekurangan dan akan dievaluasi untuk memliki desain yang lebih baik. Pelatihan ini difasilitasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Madiun. Narasumber atau instruktur berasal dari provinsi, usaha dagang makanan, minuman dan kemasan.

Tujuan dari pelatihan desain produk yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun ini adalah untuk menarik minat konsumen pasar terhadap produk dari para pelaku UMKM. Desain yang bagus dari suatu produk harus menampilkan produk yang dominan dan menarik konsumen. Manfaat yang diperoleh dari para pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan pelatihan tentang pentingnya sebuah desain yang menarik yaitu paling tidak produk dari para pelaku UMKM banyak dikenal oleh masyarakat, banyak pesanan sehingga menambah keuntungan dari para pelaku bisnis UMKM. Sementara hasil yang diperoleh dari para pelaku bisnis UMKM setelah mengikuti pelatihan mengenai desain produk yaitu produksi dan pesanan bertambah karena diminati konsumen. Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa produk terbaru atau inovasi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun.

Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sangat berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. Semakin berkualiasnya produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, maka sektor perdagangan

dan industri semakin mampu berdaya saing dan ini juga membuktikan bahwa sektor perdagangan dan industri lebih inovatif dalam pemberdayaan UMKM. Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya suatu produk dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dibuat dengan cara yang baik dan benar.

Hasil dari pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun tidak sia-sia, setelah mengikuti para pelaku UMKM melakukan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, mereka mempraktikkannya secara langsung namun juga ada beberapa pelaku UMKM yang masih enggan untuk mencoba pelatihan yang kami jelaskan. Dampak dari berbagai pelatihan yang kami lakukan ada beberapa UMKM yang semakin maju dan berkembang, dari yang sebelumnya masih tergolong kecil hingga menjadi UMKM yang cukup dikenal saat ini. Adapun para pelaku UMKM yang berhasil dan berkembang dalam melakukan perubahan desain serta inovasi produk yakni ada UMKM Wahyu Tumurun, UMKM Batik Slamet, UMKM Anyaman Plastik, UMKM Taman Sari dan lain sebagainya. Beberapa UMKM tersebut mengganti desain produk dengan yang baru dari sebelumnya agar menarik minat dari masyarakat dan produknya lebih dikenal oleh pasar karena desainnya yang menjadi lebih menarik.

Walaupun tidak semua para pelaku UMKM bersedia menerapkan apa yang dipelajari dalam berbagai pelatihan, namun ada beberapa pelaku UMKM yang mengikuti arahan dari pelatihan tersebut dan mengalami perubahan yang bagus terhadap usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu berusaha melakukan inovasi terutama di sektor perdagangan dan industri melalui pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini pemeintah daerah melakukan inovasi didalam perubahan desain produk yang bertujuan agar sektor perdagangan dan industri mampu berdaya saing dibidangnya khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Kesimpulannya aktivitas yang inovatif dalam menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analis data mengenai strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menghadapi persaingan pasar yang mengglobal di Kota Madiun. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri mengadakan berbgai macam pelatihan kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun :
   a. Dalam meningkatkan akses permodalan terhadap pelaku UMKM, pemerintah Kota Madiun melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Selain itu mempermudah pengurusan legalitas usaha, dimana hal tersebut merupakan syarat penting untuk memperoleh akses permodalan.
   b. Strategi untuk daerah pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk membantu para pelaku UMKM memasarkan produknya, hal ini dilakukan dengan cara memasarkan produk yang dihasilkan dari pelaku UMKM

melalui pameran (regional maupun nasional), pemasaran *online website* disperindagkoppar, leaflet, brosur, mengadakan kontak atau temu bisnis dengan daerah lain. Selain itu juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pemasaran produk dan penetrasi pasar.

c. Pemerintah daerah Kota Madiun melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap perbaikan mutu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) UMKM yang ada di Kota Madiun, mencakup beberapa program pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pelaku UMKM yaitu seperti pelatihan membatik, pelatihan konveksi, pelatihan keterampilan menulis kain, pelatihan jajanan tradisional, pelatihan pembuatan kerajinan sulam, pelatihan anyaman plastik, workshop industri peningkatan kualitas produk, dan pelatihan *bussiness plan* bagi UMKM sebanyak 2 kali serta baru ditemukan pelatihan anyaman daun pandan, tetapi karena kurangnya sumber daya alam (SDA) atau bahan baku di Kota Madiun membuat anyaman daun pandan ini masih sulit untuk dikembangkan. Banyaknya pelatihan-pelatihan serta workshop mengenai kewirausahaan ataupun bagaimana berwirausaha dengan baik dalam rangka pemberdayaan UMKM sehingga diharapkan jenis usaha yang dikelola pun dapat berkembang dengan baik dan dapat digunakan sebagai penompang perekonomian masyarakat itu sendiri serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan

industri di Kota Madiun. Penguasaan teknologi-teknologi terapan baru dapat digunakan secara bermanfaat dengan baik oleh para pelaku UMKM sehingga dengan penguasaan teknologi-teknologi baru tersebut pencapaian target produksi barang lebih maksimal sehingga keuntungan yang didapat pun bisa tercapai.

d. Pemerintah daerah Kota Madiun memberikan pelatihan terhadap peningkatan penggunaan teknologi tepat guna yang optimal agar produk dari UMKM bisa semakin baik dan berkualitas dengan cara memfasilitasi akses-akses sumber daya teknologi melalui perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi penyedia teknologi, pelatihan-pelatihan teknologi (pewarnaan batik, pembuatan produk, dan lain-lain) dengan memberikan bantuan peralatan.

2. Indikator utama penentu daya saing perekonomian daerah dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Madiun meliputi efektif, efisien, dan inovatif. Dalam pencapaian tujuan peningkatan daya saing yang efektif, efisien dan inovatif sektor perdagangan dan industri melakukan peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM, memberikan akses pendanaan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi serta memberikan pelatihan untuk menghasilkan inovasi-inovasi khususnya dalam perubahan desain produk terhadap pelaku UMKM. Hasilnya produk-produk unggulan dari pemberdayaan UMKM dapat dipasarkan diberbagai daerah baik diluar kota maupun diluar pulau antara lain

Surabaya, Probolinggo, Malang, Sumenep, Batam, Medan, Ambon, Jakarta, dan lain sebagainya khususnya produk batik tulis dari Kota Madiun.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengembangan terhadap UMKM hendaknya diberikan lebih banyak lagi berbagai pelatihan dan pengetahuan berbagai hal yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM agar semakin maju dan berkembang serta dapat memerangkan persaingan pasar demi mempertahankan kelangsungan usahanya.
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM dan juga aparatur menjadi modal pentimg ketika prospek perkembangan UMKM di Kota Madiun cukup bagus. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM serta aparatur dari pihak pemerintah mampu untuk melahirkan inovasi dan kreasi-kreasi baru guna menumbuhkembangakan UMKM di Kota Madiun kedepannya. Selain itu, akses permodalan perlu dimudahkan dan kemampuan menjaga ketahanan UMKM dari persaingan pasar bebas perlu ditinjau kembali mengingat faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan UMKM di Kota Madiun.

3. Diberikan reward atau penghargaan terhadap UMKM yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar memberikan motivasi bagi para pelaku UMKM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice. California: Sage Publication,* Inc.

Blog My Campus. 2013. "Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional", diakses pada Tanggal 07 Maret 2014 dari file:///D:/materi/Makna,%20Hakikat%20dan%20Tujuan%20Pembangunan%20Nasional%20%20%20Blog%20My%20Campus.htm.

B N, Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

BPS, 2013. *Kota Madiun dalam Rangka 2013*. Kota Madiun : CV. Aneka Raya.

BPS, 2014. Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 63/08/Th. XVII, 5 Agustus 2014. Diakses pada Tanggal 21 Maret 2014 dari www.bps.go.id/brs_file/pdb_05agus14.pdf

Glueck, W. F dan Jauch.L. R 1998. *Strategy Management and Bussines Policy*. New York : Mc Graw-Hil.l

Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep,Tehnik, Aplikasi.* Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.

Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP3S.

Kristiadi, J.B. PrespektifAdministrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Edisi, Khusus, Volume I No. 2. 1997

Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Marrus, Stephanie K. 1984. *Building The Strategic Plan: find, analyze, and present the rigth information*. Wiley. USA

Mattew B. Miles, A. A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Jakarta

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014", diakses pada Tanggal 07 Maret 2014 dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pepres2010_5.pdf

Pearce and Robinson. 1997. *Manajemen Strategik*, Jilid I, Binarupa Aksara, Jakarta.

Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2010-2014

Saiman, Leonardus. 2009. *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Siagian, Sondang P. 1989. *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita Dan Realita*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Situmorang, Jannes. 2008. *Strategi UMKM Dalam Menghadapi Iklim Usaha yang Tidak Kondusif*. Vol 16: 87-101, diakses pada tanggal 11 Maret 2014 dari http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2030/7_strategi_ukm.pdf

Sri Wahyudi, Agustinus. 1996. *Management Strategik : Pengantar Proses Berfikir Strategik*. Jakarta : Binatupa Aksara

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Sulistiyani, Teguh, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Suryono, Agus, 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press.

Suryono, Agus dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma ,Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang. UM-Press

Tambunan, Tulus. 1999. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta. Salemba

Tjiptono, Fandy. 1997. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta : Andi Offset, Yogyakarta.

Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Andi Offset, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta. 1985

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, "Pemerintahan Daerah", diakses pada Tanggal 07 Maret 2014 dari http://www.kpu/go.id/dmdocuments//UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", diakses pada tanggal 07 Maret 2014 dari www.danabergulir.com/...perundangan/undang-undang/UU20Tahun200...

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed.6. Jakarta : bumi Aksara

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*. Malang : UMM Press.